DPMDPPKB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2024

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpmdppkbpessel@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601
Laman: https://inspekda.pesisirselatankab.go.id Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 26 Februari 2025
Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tk.I/ IV(b)
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang telah berhasil disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai pengendali peningkatan kinerja berdasarkan sasaran strategis, urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusunnya dengan baik Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238); dan yang diturunkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan review terhadap target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,44)	99,31%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.153.341.465	Rp. 4.641.315.471	90,06%
		Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	Rp. 96.196.205	95,36%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	Rp. 1.206.466.994	96,17%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%				
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	Rp. 253.531.912	89,49%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	Rp. 5.863.156.935	89,31%
Total					**97,47%**		**Rp. 13.357.074.145**	**Rp. 12.060.667.517**	**90,29%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambarkan dalam suatu bentuk untuk mencapai masa depan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dan mengacu pada Visi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu :

"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional".

Selanjutnya Misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor 1, 2, 4, 5, 6, yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;

Hasil pengukuran dan capaian ivndicator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target ivndicator kinerja yang ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dari 3 Sasaran Strategis dengan capaian program 90,29%, berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik, serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat tercapai.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 Tahun, sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada Tahun berikutnya sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Penjelasan Umum Organisasi 5

1.5. Aspek Strategis Organisasi 18

1.6. Permasalahan Utama Organisasi 22

1.7. Sistematika Penulisan 26

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 27

2.2. Perjanjian Kinerja 31

2.3. Indikator Kinerja Utama 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Penilaian Kinerja 35

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja 36

3.3. Capaian Kinerja 38

3.4. Realisasi Anggaran 65

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 71

4.2. Saran 73

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
3. Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Data Dukung Lainnya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	iii
Tabel 1.1.	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	18
Tabel 1.2.	Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	19
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	30
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	32
Tabel 2.3.	Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	32
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	33
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	36
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	38
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024	42
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	43
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	44
Tabel 3.7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	44
Tabel 3.8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	44
Tabel 3.9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023	45
Tabel 3.10.	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	45
Tabel 3.11.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024	46

Tabel 3.12.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	46
Tabel 3.13.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024	48
Tabel 3.14.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	49
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	49
Tabel 3.16.	Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	50
Tabel 3.17.	Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	50
Tabel 3.18.	Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023	51
Tabel 3.19.	Perbandingan Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	51
Tabel 3.20.	Rekap Data IDM Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	53
Tabel 3.21.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	54
Tabel 3.22.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024	56
Tabel 3.23.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	56
Tabel 3.24.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	57
Tabel 3.25.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	58
Tabel 3.26.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia Tahun 2024	59
Tabel 3.27.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.28.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	60
Tabel 3.29.	Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	60
Tabel 3.30.	Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	61
Tabel 3.31.	Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	62
Tabel 3.32.	Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Tahun 2023	62

Tabel 3.33. Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024 62
Tabel 3.34. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 63
Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Menunjang Sasaran Strategis 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang termasuk pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dokumen Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja berdasarkan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kewenangan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka pembangunan Pemerintahan yang baik *(good governance)* seiring dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kebaikan bagi masyarakat, berupaya menghasilan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran tersedia serta terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar selaras dengan perencanaan kinerja dan penganggaran kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun merupakan penganggaran pada program dan kegiatan yang berbasis kinerja, yaitu : anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukannya realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, maka dengan capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilaksanakan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja adalah sebagai gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari faktor keberhasilan dan kegagalan terhadap capaian kinerja Tahun 2024, serta untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, baik bagi keperluan eksternal atau pihak terkait, yang menjadikan laporan kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2024;
2. Capaian kinerja dilaporkan merujuk pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, serta tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024;
3. Aspek Manajemen Kinerja, baik bagi keperluan internal yang menjadikan laporan kinerja Tahun 2024 sebagai pedoman dan petunjuk untuk dokumen lainnya.

1.4. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi baik dan fasilitas penunjang masih kurang lengkap. Adapun gedung kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana ada di 15 Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi :

a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya, bidang pemberdayaan sumber daya alam, usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan kawasan perdesaan, bidang pemerintahan nagari, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang balai penyuluh keluarga berencana;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya;
3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Bidang Pemerintahan Nagari;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. UPTD.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud lebih lanjut diuraikan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
g. Pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin indikator yang baik dan saling mendukung;
d. Mendelegasikan indikator tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
i. Menjalin indikator dengan susunan organisasi perangkat daerah dan instansi indikator untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
m. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
b. Pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
d. Pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
c. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
e. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan mempedomani tata naskah dinas;
f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
g. Memberi petunjuk, memberi tugas dan kegiatan, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
h. Menyampaikan saran dan telahaan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;

i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bidang umum dan kepegawaian, sub bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, aset, urusan rumahtangga, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
m. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
n. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja;
c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
g. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
h. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
j. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
k. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
b. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai uraian tugas :

a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai pedoman dan acuan kerja;
c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
g. Menyusun kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
h. Memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

i. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemerintahan Nagari

Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional di Bidang Pemerintahan Nagari;
b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan Bidang Pemerintahan Nagari;
c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari;
d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai uraian tugas :

a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemerintahan Nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta Keuangan, Pendapatan dan Aset Nagari;
d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang Pemerintahan Nagari;

e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta Keuangan dan Aset Nagari;
f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis Bidang Pemerintahan Nagari;
g. Menyusun saran kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur di Bidang Pemerintahan Nagari;
h. Memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemerintahan Nagari;
i. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
l. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
d. Pembinaan, evalausi dan pengawasan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Menyusun bahan rumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian melaksanakan/menyelenggarakan pengendalian penduduk dan penyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana;
f. Mengkoordinir pelaksanaaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
g. Mengkoordinir pelaksanaaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
h. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. Mengawasi tugas administrasi umum di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. Mengawasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

n. Melakukan pembinaan dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kecamatan;
o. Memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- Perencanaan dan Pelaporan;
- Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana kerja (program, kegiatan dan sub kegiatan) dan pelaporan di lingkungan dinas, memberi dukungan dan melakukan pembinaan, sesuai dengan nomenklatur dan ketentuan perundang-undangan.

7. UPTD

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPTD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, membawahi :
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Masyarakat;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Partisipasi Masyarakat; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya;
4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi :
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Bidang Pemerintahan Nagari, membawahi :
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Pemerintahan Nagari;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. UPTD, terdiri dari :
   - Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 15 Kecamatan;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 168 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

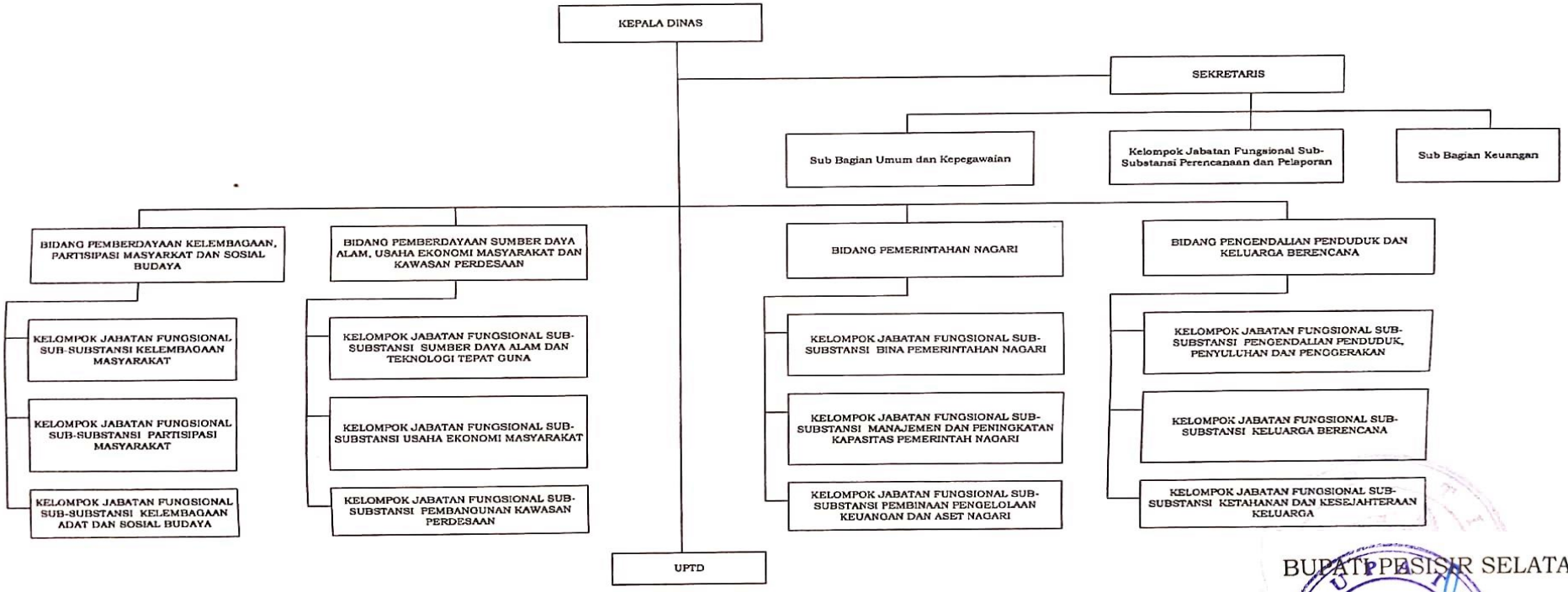

BUPATI PESISIR SELATAN,

PRUSMA YUDI ANWAR

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4.2. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang beragam, dimana jumlah keseluruhan sumber daya manusia, terdiri dari : 33 PNS dan 17 Tenaga Honorer dengan total keseluruhan sumber daya manusia Tahun 2024 sebanyak 50 Orang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Golongan	Eselon				Staf	Jumlah
	II.b	III.a	III.b	IV.a		
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/b	1	1	-	-	-	2
Golongan IV/a	-	-	1	3	1	5
Golongan III/d	-	-	3	5	2	10
Golongan III/c	-	-	-	1	6	7
Golongan III/b	-	-	-	-	4	4
Golongan III/a	-	-	-	-	3	3
Golongan II/d	-	-	-	-	2	2
Golongan II/c	-	-	-	-	-	0
Golongan II/b	-	-	-	-	-	0
Golongan II/a	-	-	-	-	-	0
Jumlah PNS	**1**	**1**	**4**	**9**	**18**	**33**
Tenaga Honorer S-II	-	-	-	-	-	0
Tenaga Honorer S-I/D-IV	-	-	-	-	11	11
Tenaga Honorer D-III	-	-	-	-	1	1
Tenaga Honorer SMA	-	-	-	-	5	5
Jumlah Tenaga Honorer	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**17**
Total	**1**	**1**	**4**	**9**	**35**	**50**

Sumber Data : Absen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; yang terdapat dalam Renstra tersebut, yaitu :

Tabel 1.2. Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang Mengatur Desa 2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari 5. Pengelolaan Aset Desa 6. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 7. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		2. Meningkatkan Sarana Pemerintahan Nagari	Meningkatkan Sarana Penunjang Pemerintahan Nagari
		3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkup Pemerintahan Nagari	1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemertintahan Nagari 2. Sosialisasi Regulasi tentang Pemerintahan Nagari 3. Pelatihan Bamus Nagari
		4. Inventarisasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat 2. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
		5. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 7. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat kewenangan Provinsi 8. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		6. Mendorong Terciptanya Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Inovasi Nagari	1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari 2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		7. Mendorong Terciptanya Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui Badan Usaha Milik Nagari Bersama 2. Meningkatkan Pembentukan Kawasan
		8. Mendorong Terbangunnya Produk Unggulan Nagari	1. Meningkatkan dan Memanfaatkan Potensi Nagari 2. Meningkatan Kerjasama Antar Nagari
	2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Penguatan Regulasi	1. Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah untuk Menciptakan, Menerapkan dan Melaporkan Inovasi
		2. Pemberian Reward dan Punishment	2. Memberikan Penghargaan dan Sanksi Atas Keberhasilan Inovasi
		3. Penguatan Sistem Inovasi	3. Membenahi Sistem secara Holistik, Serentak dan Berdasarkan Isu-Isu Sistemik
		4. Investasi dalam Pengetahuan dan Teknologi	4. Menginvestasikan Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi di Sektor Pemerintah
		5. Pemutakhiran Kerangka Kebijakan	5. Memutakhirkan Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah sesuai Perkembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Pembentukan Perangkat Daerah	6. Membentuk Perangkat Daerah yang memiliki Kapasitas untuk Mengangkat Daya Saing Daerah
		7. Penelitian dan Pengembangan	7. Mengadopsi Proses Produksi yang Inovatif melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
		8. Inovasi Sosial	8. Menciptakan Inovasi Sosial yang Mencakup Struktur Budaya Normatif atau Regulatif
		9. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi	9. Membangun Budaya Kerja dengan Membuat dan Mengembangkan Minimal Satu Inovasi dalam Setiap Tahun Anggaran
	3. Terwujudnya Keluarga Bahagia	1. Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur	1. Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi 2. Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 3. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)
		2. Meningkatnya Pelayanan KB	1. Meningkatkan Rasio Aseptor KB 2. Membangun Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan TNI dalam Peningkatan Pelayanan MKJP
		3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh KB	1. Pemenuhan Biaya Operasinal Balai Penyuluh KB 2. Pemenuhan Kebutuhan Balai Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Target masing-masing Penyuluh KB
		4. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan dalam Pelayanan KB	1. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB 2. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya di Seluruh Tingkatan Wilayah yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Standarisasi Pelayanan 3. Melakukan Kerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam Pemenuhan Fasilitas Kesehatan dalam Penyuluh KB

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

1.6. Permasalahan Utama Organisasi

Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1.6.1. Permasalahan :

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :

1. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari disinkronisasikan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan;
2. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri;
3. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang Kepengurusan KAN dan Historis Adat dimasing-masing KAN di Kab. Pesisir Selatan;
4. Belum banyaknya peran dari LPMN dalam Forum Musrenbang Nagari;
5. Masih kurangnya SDM sebagai Pengurus PKK dan kurangnya peranan PKK dalam Masyarakat.

2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :

1. Tidak memadainya anggaran kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kab. Pesisir Selatan yang lokasinya berada di berbagai Kecamatan untuk mendukung kegiatan KKN ini;
2. Adanya UPK yang bermasalah dengan hukum;
3. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK dari pengurus serta banyaknya masa periode kepengurusan habis dan tidak aktif;
4. Tidak singkronnya kegiatan unit usaha yang dijalankan dengan keadaan dan potensi Nagari akan memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN);
5. Adanya UPK yang belum bertransformasi ke BUMNag Bersama;
6. Tidak dapat diikutinya kegiatan lomba TTG dan BUMNag, baik Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena tidak adanya anggaran;
7. Kurangnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari, Kecamatan dan Provinsi karena keterbatasan anggaran.

3. Bidang Pemerintahan Nagari :

1. Banyaknya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman Pemerintah Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Belum memenuhi syarat sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Belum terkelolanya Penataan Aset Nagari dan kurangnya dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
5. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan dari 182 Nagari sedangkan Jumlah PKB hanya 36 Orang persebaran tidak merata;

2. Kurangnya minat akseptor dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

3. Kurangnya perhatian dan pembinaan serta dukungan dana untuk Pembinaan Penyuluh Kampung KB;

4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan lintas sektor terhadap perkembangan kegiatan di Kampung KB;

5. Pelaksanaan kegiatan harus ditalangi dulu oleh Koordinator Lapangan untuk semua kegiatan BOKB;

6. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;

7. Kurangnya dukungan dana APBD sebagai Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan yang terdapat 182 Nagari dan 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan pada Program Bangga Kencana untuk Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) karena tidak mencukupi dari APBN (BOKB) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, maka sangat perlunya support dari APBD (DAU) untuk kelancaran tugas Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6.2. Solusi :

1. **Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :**

    1. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari dengan memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan untuk mendampingi Nagari dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan Indonesia-RKP Nagari tahun berikutnya;
    2. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri dari berbagai aspek yang telah ditetapkan;
    3. Agar 37 KAN di Kab. Pesisir Selatan membuat Monografi Adat secara tertulis, agar penyelenggaraan KAN dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
    4. Agar LPMN mempunyai peranan dalam Forum Musrenbang Nagari dan memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam kelembagaan di Nagari;
    5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Pengurus PKK serta memiliki peranan PKK di masyarakat.

2. **Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :**

    1. Untuk Kegiatan KKN Tematik yang diadakan di Kab. Peissir Selatan pelaksanaannya langsung dilakukan dilokasi kegiatan KKN;
    2. Memfasilitasi data dan informasi terkait UPK yang bermasalah;
    3. Memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada untuk mendampingi proses pembentukkan dan pengaktifan BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK yang bermasalah, habis masa kepengurusan serta yang kurang aktif;
    4. Lebih memberdayakan lagi pendamping yang ada di Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten untuk memverifikasi Unit Usaha yang ada di Nagari agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Nagari sehingga dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN);

5. Untuk UPK yang belum bertransformasi diserahkan ke DPMD Provinsi Sumatera Barat;
6. Kegiatan TTG dan BUMNag yang diselenggarakan setiap Tahun tidak diikuti;
7. Merekap data yang dikirim oleh Kecamatan terkait data BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

3. Bidang Pemerintahan Nagari :

1. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang regulasi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Nagari melalui Peningkatan Kapasitas, Bimtek atau Pembinaan ke Nagari;
2. Perlu dilaksanakan Bimtek secara berkelanjutan untuk Perangkat Nagari dan membuat forum diskusi bagi Perangkat Nagari bersama OPD terkait (DPMDPKB, BPKPAD dan Inspektorat) untuk berkoordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Mewajibkan setiap Nagari mengirimkan 1 Perwakilan dari 182 Nagari untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari;
4. Agar sesuai dengan persyaratan sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta berpedoman dengan peraturan yang berlaku ditetapkan;
5. Perlunya koordinasi antar pihak agar Penataan Aset di Nagari dapat terkelola dengan baik dan dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
6. Perlunya dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Mengoptimalkan pertemuan rapat koordinasi bulanan di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dengan PKB/PLKB Kecamatan, agar adanya minat akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

2. Pembagian wilayah kerja sasaran berdasarkan domisili Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan ke 182 Nagari, dalam 1 Nagari rata-rata hanya terdapat 1-2 Orang sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk itu perlu diajukan penambahan anggaran dan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;

3. Penyuluh KB agar melakukan koordinasi dengan lintas sektor;
4. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Rencana Kerja Bulanan, sehingga kegiatan dilaksanakan dapat terukur sesuai target yang ditetapkan;
5. Perlu adanya peningkatan dan penambahan anggaran untuk Pembinaan Kampung KB;
6. Perlunya pemberian pemahaman kepada PKB/PLKB dan masyarakat serta lintas sektor tentang dukungan dan perhatian terhadap Kampung KB;
7. Setiap program dan kegiatan di Nagari sebaiknya dilibatkan Kampung KB.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta indikator di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
3) Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah Tahun 2024;
4) Data Dukung Lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Tahun 2023 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan Rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap Pohon Kinerja Perangkat Daerah dan Rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MAJU : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

BERMATABAT : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

AKUNTABEL : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

PROFESIONAL : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam Misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu, Misi Kedua, Misi Keempat, Misi Kelima dan Misi Keenam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Strategis Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kulaitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	1. Kecepatan Pelayanan Pemerintahan Nagari Pada Masyarakat 2. Persentase Keaktifan Kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Nagari 3. Persentase Keaktifan Kelompok Kegiatan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (63)	B (64)	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)
				Persentase Nagari Mandiri	4,95% (9 Nagari)	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	31,00% (56 Nagari)	39,56% (72 Nagari)
		4. Menghitung Jumlah Inovasi yang berhasil diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	80	80
		5. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif 6. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Memiliki Anak atau Ingin Anak tapi Ditunda, Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi (Unmet Need)	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18%	1,15%	1,15%	-	-	-
				Indeks Pembangunan Keluarga	-	-	-	61	71	72

Sumber Data : Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan metode **SMART** ***(Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound)*** atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Karena metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target kinerja dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target kinerja yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Analisis Situasi :**

   Pahami kondisi saat ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk sumber daya yang ada, tantangan dan peluang.

2. **Penetapan Tujuan :**

   Tentukan tujuan jelas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang akan membimbing penetapan target.

3. **Tujuan Strategis :**

   Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

4. **Indikator Kinerja :**

   Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan tersebut.

5. **Target Spesifik :**

   Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6. **Rencana Aksi :**

   Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7. **Monitoring dan Evaluasi :**

   Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Keterangan
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	-
		Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	-
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	-
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	Tidak Selaras

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dari semula Indikator Kinerjanya adalah Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diganti menjadi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Karena tidak selarasnya indikator kinerja yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah disebabkan adanya penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan harmonisasi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan Instansi Vertikal yang menjadi salah satu Instansi Pembina dan diselaraskan dengan penyesuaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.3. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.153.341.465	APBD
4.	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	DAK Non Fisik KB
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	APBD, DAK Non Fisik KB
Jumlah		**Rp. 13.357.074.145**	

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

2.3. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Strategis Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)
		Persentase Nagari Mandiri	4,95% (9 Nagari)	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	31,00% (56 Nagari)	39,56% (72 Nagari)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	80	80
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18%	1,15%	1,15%	-	-	-
		Indeks Pembangunan Keluarga	-	-	-	61	71	72

Sumber Data : SK Kepala Dinas Nomor : 800/197.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, pada Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia terdapat Perubahan Indikator Kinerja dari semula Indikator Kinerjanya adalah Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diganti menjadi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Karena tidak selarasnya indikator kinerja yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah disebabkan adanya penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan harmonisasi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan Instansi Vertikal yang menjadi salah satu Instansi Pembina dan diselaraskan dengan penyesuaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari hasil rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bahwa laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak ditampilkan pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat asistensi dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja tidak ditampilkan juga karena berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan arahan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak menampilkan Nilai Reformasi Birokrasi dan targetnya.

Untuk dokumen data dukung Indikator Kinerja Utama dan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, pada Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga diinputkan oleh Operator di 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan di Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN serta dapat dilihat pada Lampiran Data Dukung Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Penilaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja *(performance gap)*. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa akan indikator *(performance improvement)*.

Bila mana indikator sasaran strategis mempunyai makna indikator positif, yaitu : semakin tinggi realisasi kinerjanya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasi kinerjanya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Penilaian hasil pengukuran Capaian Sasaran Strategis menggunakan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja
Tahun 2024

No.	Klasifikasi Penilaian Kinerja	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

Sumber Data : Klasifikasi Penilaian Kinerja

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,44)	99,31%
		Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%
Total					**97,47%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Dalam hal mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Dokumen Perangkat Daerah yang telah dievaluasi dan dilakukan penilaiannya, Berdasarkan Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00%) dan terrealisasi kinerja A (80,44%) sedangkan untuk capaian kinerja 99,31%.

- Persentase Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM), terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100 dan terrealisasi kinerja 0 sedangkan untuk capaian kinerja 0,00%.

3. Terwujudnya Keluarga Bahagia

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari 17 Variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori, yaitu :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target kinerja 61 dan terrealisasi kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis dengan capaian kinerja rata-rata 97,47%. Berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.3. Capaian Kinerja

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,44)	99,31%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.153.341.465	Rp. 4.641.315.471	90,06%
		Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	Rp. 96.196.205	95,36%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	Rp. 1.206.466.994	96,17%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%				
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	Rp. 253.531.912	89,49%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	Rp. 5.863.156.935	89,31%
Total					**97,47%**		**Rp. 13.357.074.145**	**Rp. 12.060.667.517**	**90,29%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Asesor Penilaian Reformasi Birokrasi.

Formulasi :
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Nilai RB Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian RB dari Inspektorat Daerah tidak menjadi target Tahun 2024 karena tidak ditampilkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi :
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,44) dan capaian kinerja 99,31%.

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah dapat dilihat pada lampiran data dukung sesuai Berita Acara Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Atas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Terbaik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) setiap desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa Membangun, yaitu : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri.

$$\text{Formulasi} : \frac{\text{Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari yang ada}} \text{ X } 100\%$$

dengan hitungan Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri, sebagai berikut :

$$\text{Formulasi} : \frac{\text{56 Nagari Mandiri}}{\text{182 Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan}} \text{ X } 100\% = 30{,}77\%$$

Pada Tahun 2024 Persentase Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari), terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) dan capaian kinerja 175,00%.

Selanjutnya di update pada Aplikasi IDM dengan Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Formulasi :

Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi
pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri

Pada Tahun 2024 Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0 dan capaian kinerja 0,00%. Inovasi yang dilakukan, yaitu : Wisuda Lansia pada Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai.

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri karena tidak di daftarkan pada Klinik Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak dilakukannya penginputan data dukung oleh operator terkait inovasi tersebut ke Aplikasi *Innovative Government Award (IGA),* maka Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat terlaksana dan tidak dapat terrealisasi kinerjanya seperti yang diharapkan.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk per tahun yang diakibatkan oleh meningkatnya angka kelahiran dalam jangka waktu tertentu.

$$\text{Formulasi} : \frac{\text{Jumlah Penduduk Saat Ini - Jumlah Penduduk Sebelumnya}}{\text{Jumlah Penduduk Sebelumnya}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada IKU tidak menjadi target Tahun 2024 karena tidak ditampilkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Terdapatnya Perubahan Indikator Kinerja dari semula Indikator Kinerjanya adalah Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diganti menjadi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Karena tidak selarasnya indikator kinerja yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah disebabkan adanya penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan harmonisasi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan Instansi Vertikal yang menjadi salah satu Instansi Pembina Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-5935/LP.01/J.5/2024 perihal Hasil Indikator Kinerja Utama Pemutakhiran PK24. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran Program Pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari 17 Variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori, yaitu :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Formulasi :

Persentase dari Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, hasil verifikasi dan validasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81. Selanjutnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari : 3 Dimensi, yaitu : Ketentraman Keluarga target kinerjanya 59,08, Kemandirian Keluarga target kinerjanya 49,18 dan Kebahagiaan Keluarga target kinerjanya 70,23, dengan rata-rata 3 Dimensi tersebut hasil verifikasi dan validasi Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat menetapkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan target kinerjanya 59,49.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya sama dan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81, sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya 61, memiliki perbedaan dengan target kinerja Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya 61. Pelayanan yang dilakukan tetap dihitung saat pendataan awal masyarakatnya tidak ditempat, tetapi saat Pendataan Keluarga dilapangan kepada semua masyarakat dilakukan pelayanan secara optimal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Indeks Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Tahun 2023 Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti mengatakan peningkatan terjadi pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Untuk iBangga di angka 61,43, artinya secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori Keluarga Berkembang. Jika dibanding dengan target iBangga Tahun 2023 sebesar 59,00, capaiannya adalah 104,11% dengan kategori penilaian Sangat Baik.

Pada Tahun 2024 Indeks Pembangunan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 61, terrealisasi kinerja 70,5 dan capaian kinerja 115,57%.

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga diinputkan oleh Operator di 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan di Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN serta dapat dilihat pada Lampiran Data Dukung Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

1.1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

⇨ Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,44)	99,31%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**99,31%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi Dokumen Perangkat Daerah terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,44) dan capaian kinerja 99,31%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,00)	A (81,00)	A* (81,00)	A (80,17)	A (80,44)	A* (80,44)	98,98%	99,31%	99,31%*

Sumber Data : LHE AKIP Pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

*Keterangan : *) Data Capaian Kinerja Tahun 2023*

Dari Tabel 3.5. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2022, yaitu : A (80,17), diperoleh penilaian Berdasarakan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2023, yaitu : A (80,44) dan diperoleh penilaian Berdasarakan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2024, yaitu : A (80,44)*.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,44)	A (81,00)	99,31%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.6. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : A (80,00) sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja A (81,00). Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 99,30% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (81,00)	A (80,44)	99,31%

Sumber Data : Laporan Kinerja DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Tabel 3.8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB(74,08)	BB (79,27)	107	Sangat Tinggi

Sumber Data : Laporan Kinerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 3.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023

IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	78,00	66,96	85,85%	Belum Tercapai

Sumber Data : Laporan Kinerja KEMENDESPDTT Republik Indonesia Tahun 2023

Tabel 3.10. Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	KEMENDESPDTT Republik Indonesia
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,44)	BB (79,27)	B (66,96)

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024 memperoleh nilai 80,44% dengan Kategori Predikat A Interpretasi Memuaskan, terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan Pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke Level Eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator.

Tabel 3.11. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,68
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,87
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,39
4.	Evaluasi Internal	25,00	20,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		**80,44**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		**A**

Sumber Data : LHE AKIP Tahun 2023 Pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024

Dari Tabel 3.11. di atas dapat dilihat bahwa Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024 dengan komponen yang dinilai terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Perangakat Daerah dengan bobot penilaian yang telah ditentukan maka Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penilaian sesuai dengan komponen yang dinilai tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,44)	99,31%	Rp. 5.153.341.465	Rp. 4.641.315.471	90,06%	9,94%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.12. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,44) dan capaian kinerja 99,31%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 9,94%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan terdiri dari :
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN;
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
      f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
      Sub Kegiatan :
      a. Pengadaan Mebel;

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.153.341.465 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.641.315.471 sedangkan untuk capaian anggaran 90,06%.

1.2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

⇨ **Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri**

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.13. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**175,00%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.13. di atas dapat dilihat bahwa Persentase Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM), terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
1.	Persentase Nagari Mandiri	%	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	9,89% (18 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	163,74%	139,10%	175,00%

Sumber Data : Berita Acara dan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

Dari Tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Persentase Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2022, yaitu : 9,89% (18 Nagari), diperoleh penilaian Berdasarakan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2023, yaitu : 17,58% (32 Nagari) dan diperoleh penilaian Berdasarakan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2024, yaitu : 30,77% (56 Nagari).

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Nagari Mandiri	30,77% (56 Nagari)	39,56% (72 Nagari)	77,78%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.15. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : 4,95% (9 Nagari) sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja 39,56% (72 Nagari). Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 77,78% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.16. Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Kabupaten
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%

Sumber Data : Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Tabel 3.17. Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Hasil Pemutakhiran Data IDM Desa/Nagari

Sumatera Barat Tahun 2024

Status IDM	2023		2024	
Mandiri	226	21.84%	368	35.55%
Maju	486	46.96%	445	43.00%
Berkembang	298	28.79%	212	20.48%
Tertinggal	25	2.42%	10	0.97%
Sangat Tertinggal	0	0.00%	0	0.00%
Jumlah Desa/Nagari	1035	100%	1035	100%

Sumber Data : Buku Indeks Desa Membangun (IDM) DPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tabel 3.18. Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023

IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Persentase desa mandiri	7,27% (5.444 desa)	15,22% (11.456 desa)	209,38%	Tercapai
Persentase desa berkembang	77,84% (58.291 desa)	68,83% (51.801 desa)	88,42%	Belum Tercapai
Persentase desa tertinggal	14,89% (11.152 desa)	15,95% (12.004 desa)	92,88%	Belum Tercapai
Persentase kemiskinan di desa	10,80 – 12,10%	12,22%	99,01%	Belum Tercapai

Sumber Data : Laporan Kinerja KEMENDESPDTT Republik Indonesia Tahun 2023

Tabel 3.19. Perbandingan Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	DPMD Provinsi Sumatera Barat	KEMENDESPDTT Republik Indonesia
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Nagari Mandiri	30,77% (56 Nagari)	35,55% (368 Nagari)	15,22% (11.456 Nagari)

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Tahun 2023 Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; untuk menuju Desa Maju dan Desa Mandiri memerlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.

Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Selanjutnya Indeks Desa Membangun juga didayagunakan untuk mengarahkan keakurasian intervensi kebijakan Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah Desa (tipologi dan modal sosial) yang saling berkorelasi.

- Faktor Keberhasilan Desa/Nagari Mandiri :
  a. Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan dan Papan);
  b. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur);
  c. Lingkungan;
  d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
- Faktor Hambatan/Kendala Desa/Nagari Mandiri :
  a. Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa/Nagari yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
  c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan di Desa/Nagari.
- Solusi Desa/Nagari Mandiri :

Dalam Penetapan Desa/Nagari Mandiri terhadap penyusunan perencanaan Nagari beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang mempunyai ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup : infrastruktur yang memadai aksebilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelengaraan Pemerintahan yang sudah Sangat Baik dan Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang memiliki Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) $\geq$ 75%. dengan rincian Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Jumlah Nagari Mandiri Tahun 2024 terdapat 56 Nagari Mandiri pada Tahun 2024 dari 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini Tabel Lokasi Nagari Mandiri Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

Tabel 3.20. Rekap Data IDM Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Nagari	IKS	IKE	IKL	IDM	Status IDM
1.	Pancung Soal	Kudo-Kudo Inderapura	0,8457	0,9333	0,9333	0,9041	Mandiri
2.	Pancung Soal	Inderapura Selatan	0,8629	0,7667	0,8667	0,8321	Mandiri
3.	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	0,88	0,8667	0,7333	0,8267	Mandiri
4.	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	0,9029	0,7833	0,8667	0,851	Mandiri
5.	Ranah Pesisir	Pelangai	0,7486	0,9833	1	0,9106	Mandiri
6.	Ranah Pesisir	Koto Viii Pelangai	0,8971	0,6833	0,8667	0,8157	Mandiri
7.	Lengayang	Kambang	0,8686	0,8333	0,9333	0,8784	Mandiri
8.	Lengayang	Lakitan	0,8057	0,8667	0,9333	0,8686	Mandiri
9.	Lengayang	Kambang Barat	0,8457	0,8167	0,8667	0,843	Mandiri
10.	Lengayang	Lakitan Utara	0,8971	0,8333	0,8667	0,8657	Mandiri
11.	Batang Kapas	Iv Koto Hilie	0,8286	0,85	0,8	0,8262	Mandiri
12.	Batang Kapas	Koto Nan Duo Iv Koto Hilie	0,8629	0,6667	1	0,8432	Mandiri
13.	Batang Kapas	Sungai Nyalo Iv Koto Mudiek	0,8	0,7167	0,9333	0,8167	Mandiri
14.	IV Jurai	Painan	0,9086	0,8667	1	0,9251	Mandiri
15.	IV Jurai	Salido	0,9829	0,7833	0,9333	0,8998	Mandiri
16.	IV Jurai	Lumpo	0,84	0,8	0,8667	0,8356	Mandiri
17.	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	0,8571	0,7	1	0,8524	Mandiri
18.	IV Jurai	Sago Salido	0,96	0,85	0,9333	0,9144	Mandiri
19.	IV Jurai	Ampuan Lumpo	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	Mandiri
20.	IV Jurai	Painan Selatan Painan	0,9486	0,8667	0,9333	0,9162	Mandiri
21.	IV Jurai	Painan Timur Painan	0,8914	0,8	1	0,8971	Mandiri
22.	Bayang	Koto Berapak	0,8229	0,8667	0,8	0,8298	Mandiri
23.	Bayang	Pasar Baru	0,92	0,95	0,8	0,89	Mandiri
24.	Koto XI Tarusan	Nanggalo	0,7714	0,9333	0,8	0,8349	Mandiri
25.	Koto XI Tarusan	Ampang Pulai	0,8171	0,7167	0,9333	0,8224	Mandiri
26.	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai	0,8914	0,9	0,8	0,8638	Mandiri
27.	Koto XI Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	0,8286	0,75	0,9333	0,8373	Mandiri
28.	Koto XI Tarusan	Batu Hampar Selatan	0,8571	0,8333	0,8	0,8302	Mandiri
29.	Sutera	Surantih	0,84	0,9	0,7333	0,8244	Mandiri
30.	Sutera	Amping Parak	0,8	0,85	1	0,8833	Mandiri
31.	Linggo Sari Baganti	Punggasan	0,9086	0,8167	0,8667	0,864	Mandiri
32.	Linggo Sari Baganti	Air Haji	0,8857	0,8167	1	0,9008	Mandiri
33.	Linggo Sari Baganti	Air Haji Barat	0,8857	0,7	0,8667	0,8175	Mandiri
34.	Lunang	Lunang	0,9086	0,8667	0,8667	0,8806	Mandiri
35.	Lunang	Lunang Selatan	0,9429	0,8833	0,7333	0,8532	Mandiri
36.	Lunang	Lunang Barat	0,8857	0,7167	0,8667	0,823	Mandiri
37.	Lunang	Sindang Lunang	0,84	0,75	0,8667	0,8189	Mandiri
38.	Lunang	Pondok Parian Lunang	0,8743	0,75	0,8667	0,8303	Mandiri
39.	Lunang	Lunang Tengah	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	Mandiri
40.	Lunang	Lunang Satu	0,8914	0,9	0,6667	0,8194	Mandiri
41.	Lunang	Lunang Dua	0,8571	0,7833	0,9333	0,8579	Mandiri
42.	Lunang	Lunang Tiga	0,8629	0,8167	0,8667	0,8487	Mandiri
43.	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	0,9486	0,85	0,9333	0,9106	Mandiri
44.	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	0,8686	0,9667	0,8	0,8784	Mandiri
45.	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	0,8743	0,65	1	0,8414	Mandiri
46.	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	0,84	0,8	0,9333	0,8578	Mandiri
47.	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik Selatan	0,8114	0,7167	0,9333	0,8205	Mandiri
48.	Airpura	Inderapura Utara	0,8971	0,6167	0,9333	0,8157	Mandiri
49.	Airpura	Muara Inderapura	0,84	0,7833	0,9333	0,8522	Mandiri
50.	Airpura	Lalang Panjang Inderapura	0,9029	0,8167	1	0,9065	Mandiri
51.	Airpura	Tanah Bakali Inderapura	0,92	0,7	0,9333	0,8511	Mandiri
52.	Airpura	Inderapura Timur	0,7486	0,7167	1	0,8217	Mandiri
53.	Silaut	Sungai Sirah	0,8	0,8833	0,8667	0,85	Mandiri
54.	Silaut	Pasir Binjai	0,7943	0,75	0,9333	0,8259	Mandiri
55.	Silaut	Lubuk Bunta	0,8343	0,8667	0,8667	0,8559	Mandiri
56.	Silaut	Air Hitam	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	Mandiri

Sumber Data : Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Dari Tabel 3.20. Rekap Data IDM Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat bahwa Nagari Mandiri diukur Berdasarkan Indeks Komposit, yaitu :

- IKS (Indeks Komposit Sosial) dengan Dimensi terdiri dari : Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman;
- IKE (Indeks Komposit Ekonomi) dengan Dimensi terdiri dari : Keragaman Produksi, Perdagangan, Akses Distribusi, Akses Kredit, Lembaga Ekonomi dan Keterbukaan Wilayah;
- IKL (Indeks Komposit Lingkungan) dengan Dimensi terdiri dari : Kualitas Lingkungan dan Potensi dan Tanggap Bencana.

Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari), terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) dan capaian kinerja 175,00%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk nilai predikatnya Sangat Baik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Nagari Mandiri	17,58% (32 Nagari)	30,77% (56 Nagari)	175,00%	Rp. 100.881.200	Rp. 96.196.205	95,36%	4,64%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.21. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari), terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) dan capaian kinerja 175,00%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 4,64%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri, yaitu :

I. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

   Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
   b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
   c. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa;
   d. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

II. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan terdiri dari :

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
   b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 100.881.200 dan terrealisasi anggaran Rp. 96.196.205 sedangkan untuk capaian anggaran 95,36%. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 1.254.559.383 dan terrealisasi anggaran Rp. 1.206.466.994 sedangkan untuk capaian anggaran 96,17%.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.22. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.22. di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan target kinerja 100 dan terrealisasi kinerja 0 sedangkan untuk capaian kinerja 0,00%.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
1.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Rekap Nilai Inovasi Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.23. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2022, yaitu : 0, diperoleh penilaian Berdasarakan Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2023, yaitu : 0 dan diperoleh penilaian Berdasarakan Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2024, yaitu : 0.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	0	80	0%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.24. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : 100 sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja 80. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 0% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan :

  Berbeda dan berubahnya inovasi dari tahun sebelumnya, sehingga inovasi tersebut belum bisa terlaksana dan diterapkan secara optimal, seperti yang diharapkan, karena belum dibentuknya Tim Khusus untuk melaksanakan inovasi yang diusulkan dan adanya kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan inovasi tersebut serta operator khusus inovasi yang membantu pelaksanaan kegiatan untuk melakukan upload dokumen, data terkait inovasi tersebut ke aplikasi inovasi dan ke Klinik Inovasi di Kab. Pesisir Selatan.

Tidak terwujudnya dan tidak tercapainya Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan masih bersifat manual/konvensional, belum terintegrasi, kemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain/stakeholder terkait Perangkat Daerah tersebut.

- Solusi yang dilakukan :

  Meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain/stakeholder terkait Perangkat Daerah tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.25. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	0	0,00%	-	-	-	0,00%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.25. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0 dan capaian kinerja 0,00%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 0,00%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja Perangkat Daerah terkait inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, yaitu : keterbatasan anggaran serta tidak adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya inovasi Perangkat Daerah, sehingga ASN terkait inovasi tidak bisa melaksanakannya dan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola inovasi tersebut.

3. Terwujudnya Keluarga Bahagia

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.26. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**115,57%**

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.26. di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan target kinerja 61, terrealisasi kinerja 70,5 dan capaian kinerja 115,57%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
1.	Indeks Pembangunan Keluarga	Tanpa Satuan	-	-	61	-	-	70,5	-	-	115,57%

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN

Dari Tabel 3.27. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2022-2023, yaitu : tidak ada karena berbeda Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dan diperoleh penilaian Berdasarakan Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024, yaitu : 70,5.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	70,5	72	97,91%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.28. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2024, yaitu : 70,5 sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja 72. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 97,91% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.29. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%

Sumber Data : Laporan Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.29. di atas dapat dilihat bahwa Berdasarkan Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-5935/LP.01/J.5/2024 perihal Hasil Indikator Kinerja Utama Pemutakhiran PK24, hasil verifikasi dan validasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81. Selanjutnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari : 3 Dimensi, yaitu : Ketentraman Keluarga target kinerjanya 59,08, Kemandirian Keluarga target kinerjanya 49,18 dan Kebahagiaan Keluarga target kinerjanya 70,23, dengan rata-rata 3 Dimensi tersebut hasil verifikasi dan validasi Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat menetapkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan target kinerjanya 59,49.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya sama dan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81, sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya 61, memiliki perbedaan dengan target kinerja Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya 61. Pelayanan yang dilakukan tetap dihitung saat pendataan awal masyarakatnya tidak ditempat, tetapi saat Pendataan Keluarga dilapangan kepada semua masyarakat dilakukan pelayanan secara optimal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.30. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi Indikator Tujuan	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,38	60,99	99,36%
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,25	94,72	100,50%
		3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,01	65,48	109,12%
		4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	63,65	96,51%

Sumber Data : Laporan Kinerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 3.31. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga	61,81	61,2	99,01%

Sumber Data : Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-5935/LP.01/J.5/2024 perihal Hasil Indikator Kinerja Utama Pemutakhiran PK24

Tabel 3.32. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Republik Indonesia Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,00	61,43	104,11%

Sumber Data : Website : https://www.rri.co.id/nasional/583212/bkkbn-catat-capaian-indikator-pembangunan-keluarga-penuhi-target

Dari Tabel 3.32. di atas dapat dilihat bahwa menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti mengatakan peningkatan terjadi pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Untuk iBangga di angka 61,43, artinya secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori Keluarga Berkembang. Jika dibanding dengan target iBangga Tahun 2023 sebesar 59,00, capaiannya adalah 104,11% dengan kategori penilaian Sangat Baik.

Tabel 3.33. Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga
dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
			DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	BKKBN Republik Indonesia
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	70,5	60,99	61,2	61,43

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Tahun 2023 Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari 17 Variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori, yaitu :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target kinerja 61 dan terrealisasi kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57% termasuk Nilai >70 iBangga yang baik (tangguh) di Kabupaten Pesisir Selatan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.34. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61	70,5	115,57%	Rp. 283.315.042	Rp. 253.531.912	89,49%	10,51%
						Rp. 6.564.977.055	Rp. 5.863.156.935	89,31%	10,69%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.34. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan target kinerja 61, terrealisasi kinerja 70,5 dan capaian kinerja 115,57%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 10,51% dan 10,69%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga, yaitu :

I. Program Pengendalian Penduduk
   Kegiatan terdiri dari :
   1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
      a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
      b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
      c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan terdiri dari :

2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Sub Kegiatan :

   a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;
   b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
   c. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
   d. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;

Kegiatan terdiri dari :

3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

   Sub Kegiatan :

   a. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
   b. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
   c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
   d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

Kegiatan terdiri dari :

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

   Sub Kegiatan :

   a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
   b. Pembinaan Terpadu Kampung KB;
   c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 283.315.042 dan terrealisasi anggaran Rp. 253.531.912 sedangkan untuk capaian anggaran 89,49%. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 6.564.977.055 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.863.156.935 sedangkan untuk capaian anggaran 89,31%.

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menunjang pencapaian 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada Tabel 2.2. dan 2.3. sebagai berikut :

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Menunjang Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	**Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**A (81,00)**	**A (80,44)**	**99,31%**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.153.341.465**	**4.641.315.471**	**90,06%**
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**18.444.800**	**18.407.400**	**99,80%**
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.444.800	18.407.400	99,80%
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.191.126.305**	**3.785.467.838**	**90,32%**
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.125.862.305	3.720.285.838	90,17%
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.264.000	65.182.000	99,87%
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**6.404.400**	**4.027.600**	**62,89%**
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.404.400	4.027.600	62,89%
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**338.490.403**	**328.239.884**	**96,97%**
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.133.900	3.064.000	74,12%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.461.714	55.970.000	92,57%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.521.534	34.520.200	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.454.255	29.454.105	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.650.000	91,67%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.315.000	13.800.600	75,35%
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.804.000	189.780.979	99,99%
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**29.914.500**	**28.250.000**	**94,44%**
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	29.914.500	28.250.000	94,44%
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**234.881.057**	**212.680.249**	**90,55%**
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.849.980	32.212.280	71,82%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.031.077	180.467.969	94,97%
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**334.080.000**	**264.242.500**	**79,10%**
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.690.000	40.102.950	98,56%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.160.000	202.249.550	75,14%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.350.000	7.650.000	91,62%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.880.000	14.240.000	89,67%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
		Persentase Nagari Mandiri	**17,58% (32 Nagari)**	**30,77% (56 Nagari)**	**175,00%**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**100.881.200**	**96.196.205**	**95,36%**
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**100.881.200**	**96.196.205**	**95,36%**
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	16.393.400	14.928.500	91,06%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa	25.000.000	24.230.000	96,92%
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	34.487.800	34.481.950	99,98%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000	22.555.755	90,22%
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**1.254.559.383**	**1.206.466.994**	**96,17%**
						Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.254.559.383**	**1.206.466.994**	**96,17%**
						Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.480.900	13.910.500	89,86%
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruuna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.239.078.483	1.192.556.494	96,25%
2.	**Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**	**Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah**	**100**	**0**	**0,00%**				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
3.	**Terwujudnya Keluarga Bahagia**	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**61**	**70,5**	**115,57%**	**Program Pengendalian Penduduk**	**283.315.042**	**253.531.912**	**89,49%**
						Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**283.315.042**	**253.531.912**	**89,49%**
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	84.115.042	83.689.020	99,49%
						Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	109.200.000	109.150.000	99,95%
						Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000	60.692.892	67,44%
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**6.564.977.055**	**5.863.156.935**	**89,31%**
						Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1.513.989.855**	**1.293.299.350**	**85,42%**
						Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	858.999.855	762.548.800	88,77%
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	224.998.000	186.600.000	82,93%
						Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	108.685.000	72,46%
						Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	279.992.000	235.465.550	84,10%
						Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**546.000.000**	**529.850.000**	**97,04%**
						Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	546.000.000	529.850.000	97,04%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
						Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**763.146.000**	**746.854.585**	**97,87%**
						Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjanng Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.970.555	44.528.545	99,02%
						Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	656.375.445	640.802.240	97,63%
						Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	61.800.000	61.523.800	99,55%
						Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**3.741.841.200**	**3.293.153.000**	**88,01%**
						Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.749.000	3.749.000	100%
						Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.409.492.200	1.207.524.000	85,67%
						Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	2.328.600.000	2.081.880.000	89,40%
Total					**97,47%**		**Rp. 13.357.074.145**	**Rp. 12.060.667.517**	**90,29%**

Sumber Data : Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan Realisasi Anggaran DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dari Fungsional Desember Tahun 2024

Dari Tabel 3.35 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 97,47%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk menunjang pencapaian 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV, JFT dan Staf Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperoleh total anggaran Rp. 13.357.074.145 dan terrealisasi anggaran Rp. 12.060.667.517 sedangkan untuk capaian anggaran 90,29%.
2. Dalam melaksanakan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dengan pengukuran sasaran strategis, maka diperoleh rata-rata capaian program 90,29%. Berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.
3. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.296.406.628, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran}} \text{ x } 100\%$$

   Dari 4 Indikator Kinerja telah ditetapkan dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 9,71%.
4. Dalam mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan bertingkat dengan atasan langsung, yaitu : mulai dari Kepala Dinas (Eselon II) dengan bertanggungjawab kepada Bupati, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Eselon III) dengan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Fungsional Tertentu (Eselon IV) dengan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, serta Staf dengan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang ataupun Sekretaris Dinas, yang telah melakukan Perjanjiaan Kinerja dengan masing-masing atasan langsung, agar alokasi anggaran dan realisasi anggaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan, sebagai berikut :

a. Capaian Sasaran Strategis

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdiri dari 4 indikator kinerja, maka capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
   - Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00) dan terrealisasi kinerja A (80,44) sedangkan untuk capaian kinerja 99,31%.
   - Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%.

     Dari Sasaran Starategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Persentase Nagari Mandiri dengan predikat penilaian Sangat Baik.
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
   - Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0, capaian indikator kinerja 0,00%,

     Dari Sasaran Starategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan predikat penilaian tidak dapat diukur karena tidak terlaksananya kegiatan inovasi tersebut.
3. Terwujudnya Keluarga Bahagia, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
   - Indeks Pembangunan Keluarga dengan target kinerja 61 dan terrealisasi kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57%.

     Dari Sasaran Starategis Terwujudnya Keluarga Bahagia dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan predikat penilaian Sangat Baik.

Dari 4 Indikator Kinerja tersebut, terdapat 3 Indikator Kinerja terlaksana dengan Sangat Baik melebihi target yang telah ditetapkan, selanjutnya terdapat 1 indikator kinerja nilai predikatnya tidak dapat diukur, karena tidak dapat terlaksananya inovasi tersebut.

b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan rata-rata capaian indikator kinerja adalah 100%, dimana indikator kinerja mulai dari yang tertinggi hingga sampai dengan indikator kinerja terrendah, yaitu :

- Capaian Indikator Kinerja Tertinggi :
  Persentase Nagari Mandiri dengan capaian kinerjanya adalah 175,00%, selanjutnya indikator kinerja dengan Indeks Pembangunan Keluarga dengan capaian kinerjanya adalah 115,57% dan indikator kinerja setelahnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerjanya adalah 99,31%.
- Capaian Indikator Kinerja Terrendah :
  Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan capaian indikator kinerja 0,00%.

c. Capaian Realisasi Anggaran

Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang bersumber dari DAU/APBD dan DAK Non Fisik terdapat 2 Urusan, 5 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.153.341.465 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.641.315.471 sedangkan untuk capaian anggaran 90,06%.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 100.881.200 dan terrealisasi anggaran Rp. 96.196.205 sedangkan untuk capaian anggaran 95,36%.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 1.254.559.383 dan terrealisasi anggaran Rp. 1.206.466.994 sedangkan untuk capaian anggaran 96,17%.
4. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 283.315.042 dan terrealisasi anggaran Rp. 253.531.912 sedangkan untuk capaian anggaran 89,49%.
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 6.564.977.055 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.863.156.935 sedangkan untuk capaian anggaran 89,31%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerjanya adalah 97,47%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total anggaran Rp. 13.357.074.145 dan terrealisasi anggaran Rp. 12.060.667.517 sedangkan untuk capaian anggaran 90,29%, maka Berdasarkan Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dengan predikat penilaian Sangat Baik melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.2. Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra, RKPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atau pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari, Badan Musyarwarah Nagari, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Badan Usaha Milik Bersama (BUMNagma), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) serta Penyuluh Keluarga Berencana atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) terdapat di 15 Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan dan melakukan pembinaan kader KB pada 182 Nagari Se-Kabupaten Peissir Selatan.

DPMDPPKB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2024

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpmdppkbpessel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.)

PIHAK PERTAMA,
PLT. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

(SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.)
NIP. 19780415 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
		Persentase Nagari Mandiri	17,58%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.961.718.665	APBD
4.	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	DAK Non Fisik KB
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	APBD, DAK Non Fisik KB
Jumlah		**Rp. 13.165.451.345**	

Painan, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.)

PIHAK PERTAMA,
PLT. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

(SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.)
NIP. 19780215 199802 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.)

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

(SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.)
NIP. 19780215 199802 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
		Persentase Nagari Mandiri	17,58%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga	61

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 100.881.200	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.254.559.383	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.153.341.465	APBD
4.	Pengendalian Penduduk	Rp. 283.315.042	DAK Non Fisik KB
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.564.977.055	APBD, DAK Non Fisik KB
Jumlah		**Rp. 13.357.074.145**	

Painan, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.)

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

(SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.)
NIP. 19780215 199802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGANDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/197.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa, Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa, Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan kinerja yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan Tolak Ukur dalam Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGANDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800/197.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2024
TANGGAL 15 Oktober 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 :

ESELON II :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (63)	B (64)	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)
		Persentase Nagari Mandiri	4,95% (9 Nagari)	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	31,00% (56 Nagari)	39,56% (72 Nagari)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	80	80
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18%	1,15%	1,15%	-	-	-
		Indeks Pembangunan Keluarga	-	-	-	61	71	72

ESELON III :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan)	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu	70%	75%	75%	80%	85%	90%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif	4,84%	6,45%	7,10%	7,74%	9,35%	11,29%
		Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) $\geq$ Rp. 10.000.000	2,20%	2,75%	3,85%	4,95%	7,69%	10,44%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Jumlah Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
		Jumlah Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
6.	Meningkatnya Kepesertaan PUS yang Menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang Ber-KB	59,87%	60,01%	61,12%	61,47%	62,14%	62,89%
7.	Penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Rapat Koordinasi TPK Kabupaten Pesisir Selatan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Audit Kasus Stunting	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus
8.	Pembekalan Kampung KB	Pembinaan Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB
		Balai Penyuluh KB yang terbina	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB
9.	Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Laporan Statistik Rutin	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Validasi Laporan SIGA	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Data dan Informasi Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

KINERJA OPERASIONAL :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Dinas	Persentase pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	90%	92%	94%	96%	98%	100%
		Persentase dokumen publik dan dipublish	93%	94%	95%	96%	97%	98%
		Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran	90%	92%	94%	96%	98%	100%
2.	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Dinas	Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan untuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat	35 Anggota	36 Anggota	37 Anggota	37 Anggota	37 Anggota	37 Anggota
		Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN)	182 Anggota	182 Anggota	182 Anggota	264 Anggota	546 Anggota	728 Anggota
		Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Dilklat dan Bimbingan Teknis	310 Anggota	350 Anggota	400 Anggota	575 Anggota	750 Anggota	925 Anggota
		Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	670 Pengelola	670 Pengelola	670 Pengelola	670 Pengelola	670 Pengelola	670 Pengelola

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelembagaan PKK yang aktif dan dapat melaksanakan Fungsi Pokja PKK	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan
		Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang aktif	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan
6.	Meningkatnya Peran Serta dan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gotong Royong	70 Orang	75 Orang	80 Orang	85 Orang	95 Orang	100 Orang
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari	70 Orang	75 Orang	80 Orang	85 Orang	95 Orang	100 Orang
7.	Meningkatnya Kompetensi Nagari	Jumlah Nagari yang mengikuti Ajang Berprestasi/Lomba Nagari	2 Nagari	4 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	8 Nagari	10 Nagari
		Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
8.	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	80 Pengurus	95 Pengurus	110 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus
9.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Nagari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Jumlah Pengurus UEM yang mengikuti Pelatihan	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus
		Jumlah Pengurus UPK yang mengikuti Pelatihan	40 Pengurus	40 Pengurus	60 Pengurus	60 Pengurus	60 Pengurus	60 Pengurus
		Jumlah Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	2 Nagari	5 Nagari	7 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	12 Nagari

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.	Meningkatnya Kerjasama Antar Nagari	Jumlah Kerjasama yang disepakati	28 Kerjasama	29 Kerjasama	30 Kerjasama	31 Kerjasama	32 Kerjasama	34 Kerjasama
		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	4 Kawasan	5 Kawasan	7 Kawasan	8 Kawasan	9 Kawasan	10 Kawasan
11.	Meningkatnya Manajemen Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan	30 Orang	31 Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
		Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana	31 Nagari	-	151 Nagari	-	53 Nagari	-
12.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang mengelola Keuangan Nagari sesuai aturan yang berlaku	Persentase Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu	42%	45%	47%	50%	57%	65%
13.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap	70%	75%	80%	85%	90%	95%
14.	Meningkatnya Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari	Jumlah Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
15.	Meningkatnya Pelayanan KB	Jumlah Akseptor KB	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang
		Jumlah Mitra Bangga Kencana	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra
16.	Meningkatkan Kualitas Faskes Pelayanan KB	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes
		Jumlah Nakes yang mengikuti Pelatihan Teknis	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes
17.	Meningkatnya Peranan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.	Meningkatnya Penyuluhan KB dan Ibu Balita KB	Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB
		Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan
19.	Meningkatnya Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama	Persentase Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun	9,1%	9,2%	9,3%	9,4%	9,5%	9,6%
20.	Meningkatnya Layanan Konseling	Jumlah Pusat Konseling	50 Konseling	52 Konseling	54 Konseling	56 Konseling	58 Konseling	60 Konseling
21.	Meningkatnya Keaktifan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang aktif	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan
22.	Meningkatkan Pola Asuh dan Tumbuh Kembang Anak	Persentase Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya	75%	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber Data : Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 :

Agar seluruh stakeholder Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Nilai RB Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Asesor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Formulasi	:	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Formulasi	:	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

3. Persentase Nagari Mandiri :

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) setiap desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa Membangun, yaitu : Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari yang ada}} \text{ X } 100\%$
Sumber Data	:	Aplikasi IDM, Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
Formulasi	:	Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri
Sumber Data	:	Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

5. Laju Pertumbuhan Penduduk :

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk per tahun yang diakibatkan oleh meningkatnya angka kelahiran dalam jangka waktu tertentu
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Saat Ini - Jumlah Penduduk Sebelumnya}}{\text{Jumlah Penduduk Sebelumnya}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU) dari BKKBN dan BPS Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

6. Indeks Pembangunan Keluarga :

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran Program Pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga
Formulasi	:	Persentase dari Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

7. <u>Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yaitu : pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Sekretaris
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disampaikan}} \text{ X } 100\%$
Sumber Data	:	Laporan Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

8. <u>Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait
Formulasi	:	Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari Instansi terkait
Sumber Data	:	Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

9. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh Bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk Bagian Sekretariat yang kemudian dirata-ratakan
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang}}{\text{Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

10. Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan merupakan inovasi yang disusun oleh Seluruh Eselon III pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan inovasi sehingga menjadi inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan yang akan dinilai dalam ajang *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri setiap tahunnya
Formulasi	:	Jumlah Inovasi Setiap Eselon III
Sumber Data	:	Bagian Sekretariat dan Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

11. <u>Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu :</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan}} \times 100\%$$

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

12. <u>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari ;</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari merupakan peran yang sudah dijalankan, yaitu : melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan bidang kesehatan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, selanjutnya peran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, yaitu : menerima pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat

Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

13. <u>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari. Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan Pemerintahan Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari
Formulasi	:	Jumlah Kecamatan Se-Kab. Pesisir Selatan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
Sumber Data	:	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

14. <u>Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Lembaga Ekonomi merupakan pranata sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif}}{\text{Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

15. <u>Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000 :</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari yang ada}} \text{ X } 100\%$$

Sumber Data : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

16. <u>Jumlah Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi :</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan penggunaan Sistem Informasi untuk membantu Pemerintahan Nagari dalam mengelola Data dan Informasi dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan

Formulasi : Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

17. Jumlah Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : SOP Pelayanan Pemerintahan Nagari merupakan suatu pedoman atau Acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintahan Nagari. Berdasarkan indikator teknis administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan

Formulasi : Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

18. Persentase PUS yang Ber-KB :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase PUS yang Ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah PUS yang Ber-KB di Kab.Pesisir Selatan}}{\text{Jumlah PUS di Kab.Pesisir Selatan}} \text{ X } 100\%$$

Sumber Data : Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

19. Rapat Koordinasi TPK Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari : Bidan Desa/Nagari, Kader TP-PKK dan Kader KB untuk melaksanakan Pendampingan Keluarga, meliputi : Penyuluhan, Fasilitasi Pelayanan, Rujukan dan Fasilitasi Penerimaan Program Bantuan Sosial kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
Formulasi	:	Jumlah Rapat Koordinasi TPK Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

20. Audit Kasus Stunting :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Audit Kasus Stunting merupakan upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveylans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penampisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu : Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta/Balita
Formulasi	:	Jumlah Kasus Stunting yang ada di Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

21. <u>Pembinaan Kampung KB :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan dimana terdapat Integrasi dan Kofergensi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penguatan Institusi Keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Kampung KB di Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

22. <u>Balai Penyuluh KB yang terbina :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Balai Penyuluh KB merupakan balai yang terletak di wilayah Kecamatan serta sebagai wadah kelembagaan penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditingkat Kecamatan sebagai Lembaga Non Strutural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD di Kabupaten
Formulasi	:	Jumlah Balai Penyuluh KB di Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

23. Laporan Statistik Rutin :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Laporan Statistik Rutin merupakan laporan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi pengelolaan data statistik rutin, yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Formulasi	:	Jumlah Laporan yang disampaikan tiap bulan
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

24. Validasi Laporan SIGA :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Validasi Laporan SIGA merupakan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara menunjukkan sesuatu yang sesuai baik bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dan menunjukkan keabsahannya.
Formulasi	:	Jumlah Laporan SIGA yang disampaikan tiap bulan
Sumber Data	:	Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN
Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

25. Data dan Informasi Keluarga :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Data dan Informasi Keluarga merupakan data dan informasi dari hasil pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data serta menyebarluaskan data berdasarkan Pendataan Keluarga

Formulasi : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga yang disampaikan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

26. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di Media Sosial, Media Cetak maupun Melalui Kotak Saran yang telah disediakan

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Saran}} \text{ X } 100\%$$

Sumber Data : Media Sosial, Media Cetak dan Kotak Saran

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

27. Persentase Dokumen Publik dan dipublish :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Publik dan dipublish merupakan dokumen yang diupload ke website PPID DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Publik yang dipublish}}{\text{Jumlah Dokumen Publik}} \times 100\%$$

Sumber Data : Website PPID DPMDPPKB Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

28. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan terkait dengan perkantoran, meliputi : sarana dan prasarana, operasional kantor dan sejenisnya

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$$

Sumber Data : Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

29. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Sekretariat secara teknis disusun oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Formulasi	:	Jumlah Dokumen Perencanaan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Sekretariat DPMDPPKB Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

30. Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Peningkatan Kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	:	Jumlah ASN DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data	:	Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

31. <u>Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat merupakan peningkatan kapasitas Lembaga Adat dimaksudkan agar Lembaga Adat dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data	:	Lembaga Adat Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

32. <u>Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	LPMN yang mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) merupakan peningkatan kapasitas LPMN dimaksudkan agar LPMN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data	:	LPMN Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

33. Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Diklat dan Bimtek :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	PKK yang mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas PKK dimaksudkan agar PKK dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Anggota PKK yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data	:	PKK Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

34. Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi terintegrasi yang mengikuti Diklat dan Bimtek :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dimaksudkan agar Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data	:	Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

35. <u>Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara teknis disusun dan direkap oleh Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
Formulasi	:	Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

36. <u>Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan dapat melaksanakan Fungsi Pokja PKK :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Kelembagaan PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia
Formulasi	:	Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan dapat melaksanakan Fungsi Pokja PKK
Sumber Data	:	Kelembagaan PKK Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

37. <u>Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Aktif :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi serta saling memperkuat antar program dan kegiatan
Formulasi	:	Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi
Sumber Data	:	Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

38. <u>Jumlah Masyarakat yang mengikuti gotong royong :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan masyarakat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari
Formulasi	:	Jumlah Masyarakat yang mengikuti gotong royong
Sumber Data	:	Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

39. <u>Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang) merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari secara bersama-sama dengan pihak terkait dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari untuk dapat menyampaikan aspirasi pada Forum Musyawarah Nagari
Formulasi	:	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

40. <u>Jumlah Nagari yang mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Lomba Nagari merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah dengan melakukan penjaringan Desa/Nagari berprestasi untuk dapat mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari
Formulasi	:	Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

41. Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Profil Desa merupakan dokumen yang berisikan data dan informasi mengenai desa
Formulasi	:	Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

42. Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) merupakan usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan berbadan hukum. Selanjutnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) merupakan mempunyai tugas untuk mengelola operasi dan pemeliharaan sistem air minum yang sudah dibangun
Formulasi	:	Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	BUM Nag dan KP-SPAMS Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

43. <u>Jumlah Pengurus UEM yang mengikuti Pelatihan :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) merupakan kegiatan yang dilakukan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari
Formulasi	:	Jumlah Pengurus UEM yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

44. <u>Jumlah Pengurus UPK yang mengikuti Pelatihan :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD)
Formulasi	:	Jumlah Pengurus UPK yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

45. Jumlah Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari
Formulasi	:	Jumlah Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

46. Jumlah Kerjasama yang disepakati :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Kerjasama Antar Nagari merupakan suatu rangkaian kegiatan secara bersama-sama antar Nagari dengan Pihak Ketiga dalam bidang Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Formulasi	:	Jumlah Kerjasama yang disepakati Antar Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

47. Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
Formulasi	:	Jumlah Kawasan Perdesaan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

48. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan merupakan semua unsur yang terlibat didalam Pemerintahan Nagari
Formulasi	:	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan Tahun n
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

49. <u>Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
Formulasi	:	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

50. <u>Persentase Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pemerintahan Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan APB Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \text{ X } 100\%$
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

51. <u>Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap :</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai aset Pemerintahan Nagari

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \text{ X } 100\%$$

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

52. <u>Jumlah Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari :</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peta Batas Nagari merupakan peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, meliputi : pilar batas, garis batas, topografi perairan dan transportasi

Formulasi : Jumlah Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

53. Jumlah Akseptor KB :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Akseptor KB merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program
Formulasi	:	Jumlah Akseptor KB Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

54. Jumlah Mitra Bangga Kencana :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Mitra Bangga Kencana merupakan perseorangan atau lembaga Pemerintah, organisasi swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
Formulasi	:	Jumlah Mitra Bangga Kencana Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

55. <u>Jumlah Ketersedian Sarana dan Prasarana Faskes :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

56. <u>Jumlah Nakes yang mengikuti Pelatihan Teknis :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mengikuti Pelatihan Teknis merupakan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan (Nakes) dimaksudkan agar Tenaga Kesehatan (Nakes) dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	:	Jumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mengikuti Pelatihan Teknis
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

57. <u>Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kader Kampung KB, Para Lintas Sektor, Pemerintahan Nagari maupun PLKB Kecamatan di Kampung KB dalam mengadvokasi/membuat proposal/mengajak aktif turut serta dalam menggiatkan dan merealisasikan semua kegiatan pada program Kampung KB, sehingga dengan bantuan/fasilitasi pendampingan, penyuluhan maupun sosialisasi, baik pada Bidang Pemukiman, Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain sebagainya
Formulasi	:	Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

58. <u>Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD merupakan perpanjangan tangan Pemerintah khususnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam melaksanakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana maupun Mewujudkan Ketahanan Keluarga
Formulasi	:	Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

59. <u>Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Penyuluhan KB yang dilakukan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Nagari tentang pentingnya Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pembangunan di Nagari
Formulasi	:	Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

60. <u>Persentase Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari berbagai aspek, yaitu : ekonomi, kesehatan, mental/psikologi
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun}}{\text{Jumlah Perkawinan yang sudah siap dari berbagai aspek}} \text{ X } 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan dan BPS Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

61. <u>Jumlah Pusat Konseling :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pusat Konseling merupakan proses pelayanan konseling yang dilakukan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan layanan dan dukungan kepada keluarga dalam hal perencanaan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan secara menyeluruh
Formulasi	:	Jumlah Pusat Konseling Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

62. <u>Jumlah Kelompok Kegiatan yang aktif :</u>

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Kelompok Kegiatan (Poktan) merupakan wadah kegiatan Program Bangga Kencana diharapkan mampu menjalankan Program Bangga Kencana secara menyeluruh melalui Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dihadiri oleh Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kampung KB
Formulasi	:	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang aktif Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	:	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

63. <u>Persentase Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya :</u>

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemantauan Tumbuh Kembangnya merupakan suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan pertumbuhan (status gizi kurang atau gizi buruk, anak pendek), penyimpangan perkembangan (terlambat bicara) dan penyimpangan mental emosional anak (gangguan konsentrasi dan hiperaktif). Pemantauan tumbuh kembang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak serta menemukan secara dini adanya gangguan tumbuh kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya lebih baik

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya}}{\text{Jumlah Anak yang ada di Kab. Pesisir Selatan}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Telp. 58279 Fax : 442273 PO.Box 500 Padang 25
http://dpmd.sumbarprov.go.id... e-mail dpmd_provsumbar@yahoo.com

Nomor : 413.5/ 551 /DPMD/2024.
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Undangan

Padang, 13 Agustus 2024 M
08 Syafar 1446 H

Kepada, Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ OPD yang menangani urusan POSYANTEK dan TTG
2. Bappeda Kota Payakumbuh
3. Pemenang Lomba POSYANTEK dan TTG

di -
Tempat.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemenang Lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 410-381-2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Pos Pelayanan Teknologi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Pemenang Lomba Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 410-348-2023 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, bersama ini disampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk menyerahkan hadiah perlombaan berupa Piala dan Piagam Penghargaan pada tanggal 17 Agustus 2024 dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diundang untuk menghadiri acara dimaksud yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Sabtu/ 17 Agustus 2024
Pukul	:	16.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Istana Gubernuran Sumatera Barat Jln. Jenderal Sudirman Nomor 50 Padang.
Perihal	:	1. Gladi Resik penyerahan penghargaan; 2. Penyerahan hadiah lomba.

Sedangkan biaya untuk menghadiri acara dibebankan kepada masing masing Undangan.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT,

MAHDIANUR, SE.MM
Pembina / NIP : 19770710 200502 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 413.5/ 651 /DPMD-2024
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024
PERIHAL : UNDANGAN

DAFTAR PEMENANG LOMBA POSYANTEK BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

No	Nama Posyantek	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Predikat
1.	Mansiro	Batipuh Selatan	Tanah Datar	Juara I
2.	Paus	Padang Panjang Barat	Padang Panjang	Juara II
3.	Mitra Karya Abadi	Lubuk Sikaping	Pasaman	Juara III

DAFTAR PEMENANG LOMBA TTG UNGGULAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

No.	Nama Alat	Kabupaten/Kota	Predikat
1.	Kompor Berbahan Bakar Minyak Jelantah	Payakumbuh	Juara I
2.	Oven Pengering Padi	Pesisir Selatan	Juara II
3.	Penangkaran Bibit Kentang Smart Farming IOT	Solok	Juara III

DAFTAR PEMENANG LOMBA INOVASI TTG
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

No.	Nama Alat	Kabupaten/Kota	Predikat
1.	Tong Sampah Organik Pintar	Dharmasraya	Juara I
2.	Pengipas Padi Multi Fungsi	Solok	Juara II
3.	Boiler Uap Otomatis	Padang	Juara III

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT,

MAHDIANUR, SE.MM
Pembina / NIP : 19770710 200502 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

No.	Bidang / Bagian	Kegiatan	Nama Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Jambore Kader PKK Tingkat Kab. Pesisir Selatan	Juara Umum Lomba Jambore Kader PKK Ke- 52 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pembukaan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-52 Jambore Kader PKK Tingkat Kab. Pesisir Selatan		Painan Convention Center (PCC), 7 Juni 2024
2.	Pemerintahan Nagari	Status Nagari Mandiri di Kab. Pesisir Selatan	Pemberian Penghargaan Piagam dan Lencana Desa Mandiri Kepada 14 Wali Nagari dengan Status Nagari Mandiri di Kab. Pesisir Selatan		Gor. H. Ilyas Yakub Painan, 17 Juni 2024
3.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stunting Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Penghargaan Kab. Pesisir Selatan Sebagai Kabupaten dengan Jumlah Pendampingan Terbanyak pada Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting (Verval KRS) Tingkat Provinsi Sumatera Barat		Padang, 21 Juni 2024

No.	Bidang / Bagian	Kegiatan	Nama Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
4.	Pemerintahan Nagari	Perpanjangan Masa Jabatan Wali Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan	Pemberian Pengukuhan dan Penyerahan SK Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan 93 Wali Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan		Painan Convention Center (PCC), 26 Juni 2024
5.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Penghargaan Pilot Project Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Program Koperasi PKK Gelari Pelangi Tingkat Provinsi Sumatera Barat		Alahan Panjang Kab. Solok, 16 Juli 2024
6.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Juara III Lomba Kreasi Jingle Galari Pelangi Tingkat Provinsi Sumatera Barat		Alahan Panjang Kab. Solok, 16 Juli 2024
7.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Harapan III Lomba Cerdas Cermat PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat		Alahan Panjang Kab. Solok, 16 Juli 2024

No.	Bidang / Bagian	Kegiatan	Nama Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
8.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Harapan III Lomba Paduan Suara PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat		Alahan Panjang Kab. Solok, 16 Juli 2024
9.	Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Lomba TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Juara II Pemenang Lomba TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan Nama Alat Oven Pengering Padi Kabupaten Pesisir Selatan dari DPMD Provinsi Sumatera Barat		Istana Gubernur Sumatera Barat, 17 Agustus 2024
10.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wisudawan / Wisudawati Sekolah Lansia Kab. Pesisir Selatan	Pemberian Penghargaan Kepada Wisudawan / Wisudawati Sekolah Lansia di Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang dan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan		Muaro Bantiang, Kec. Koto XI Tarusan, 23 Oktober 2024
11.	Sekretariat	Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Kab. Pesisir Selatan	Penghargaan untuk 5 Perangkat Daerah Terpilih Se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Penerimaan Kelayakan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral dengan Judul Kompilasi Produk Administrasi Capaian Akseptor KB dari BPS Kabupaten Pesisir Selatan		Hotel Triza Painan, 7 November 2024

No.	Bidang / Bagian	Kegiatan	Nama Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
12.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Peningkatan Kapasitas Kaum Kab. Pesisir Selatan	Pemberian Penghargaan Peningkatan Kapasitas Kaum kepada Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas dari DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan		Hotel Triza Painan, 9 Desember 2024
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Pemberian Penghargaan dari Telkomsel ke DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Atas Kerjasamanya Bersama Telkomsel Sepanjang Tahun 2024		Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, 13 Februari 2025

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

VISI

MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

MISI

- **Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- **Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
- **Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan**
- **Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing**
- **Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis**

Kinerja Strategis Daerah

- **Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi**
  - Indek Reformasi Birokrasi (2021= CC 56,18 ; 2026=(B) 65)
- **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
  - Usia Harapan Hidup (2021= 70,96; 2026=71,92)
- **Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**
  - Tingkat Kemiskinan (2021=7,92 ; 2026=7,16)
- **Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat**
  - Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (2021=4700 ; 2026= 7200)
- **Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas**
  - Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan (2021=10,56 ; 2026=21,34)
- **Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing**
  - Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM (2021=3,000 ; 2026=3,800)
- **Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis**
  - Indeks Kebahagiaan masyarakat (2021= 68,42 ; 2026=75,92)

Kinerja Strategis Perangkat Daerah

- **Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja**
  - 1. Opini BPK ((2021= WTP; 2026= WTP))
    2. Nilai Sakip ((2021 = B (66,88); 2026 = BB (78))
    3. Nilai LPPD (2021 = 3209; 2026 = 3240)
    4. Level Maturitas SPIP (2021 = 3(3,0) ; 2026 =3(3,2)
    - **Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan**
      - Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja
    - **Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
      - Level Maturitas SPIP (2021 = 3 (3,0); 2026 = 3 (3,2))
    - **Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
      - Opini BPK ((2021= WTP; 2026= WTP))
- **Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi**
  - 1. Indeks Kelembagaan 2021= 2026= P-5 sangat efektif)
    2. Indek SPBE (2021 = 3,34; 2026 = 3,90)
    3. Indeks Inovasi Daerah (2021= 5.150 ; 2026= 10.500)
    4. Indeks Profesionalitas ASN (2021 = 48,78; 2026 = 85)
    - **Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah**
      - Persentase Kajian Kelitbangan yang dihasilkan terhadap kebutuhan
    - **Meningkatnya Inovasi Daerah**
      - Jumlah Inovasi PD
    - **Meningkatnya Daya Saing ASN**
      - Indeks Profesionalitas ASN (2021 = 48,78; 2026 = 85)
- **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**
  1. AKB (2021= 7; 2026= 8)
  2. AKI (2021= 172; 2026=75)
  3. **Prevalensi stunting (2021=12,3; 2026=8,88)**
  4. Angka kesakitan
- **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan**
  - Persentase RT sektor unggulan yang keluar dari garis kemiskinan
- **Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia**
  1. Jumlah kunjungan wisatawan (2021=344.297 ; 2026 = 2.073.000)
  2. Lama tinggal wisatawan (2021= 1,25; 2026= 1,5)
- **Berkembangnya Ekonomi Kreatif**
  - Jumlah omset usaha ekonomi kreatif (2021=7,2 M ; 2026= 50 M)
- **Meningkatnya daya saing pendidikan**
  1. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi (2021= 3; 2026=14)
  2. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (2021=5,9258 ; 2026=10,0682)
  - **Meningkatkan literasi masyarakat**
    - Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (2021=5,9258 ; 2026=10,0682)
- **Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat**
  1. Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta (2021=63%;2026=100%)
  2. Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola (2021=tinggi ±30 org ; 2026=tinggi ≥21 org)
- **Terwujudnya Keluarga Bahagia**
  1. 1. Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga (2021=0,00053 ; 2026=0,0006)
  2. 2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni (2021=90,53 ; 2026=94,07)
- **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri**
  1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (2021=56,93 ; 2026=56,93)
  2. Jumlah nagari tangguh bencana (2021= pratama (34) Madya (0) utama (0) ; 2026= Pratama (62) Madya (80) Utama (60))

Painan, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan,

Dra. DEWIRA, S.Sos.
NIP. 19690218 199303 1 003

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

VISI BUPATI PESISIR SELATAN :

MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

MISI BUPATI PESISIR SELATAN :

1. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN;
2. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT;
4. MEWUJUDKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG NYAMAN DAN BERKESAN;
5. MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, KREATIF DAN BERDAYA SAING;
6. MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS;

TUJUAN DINAS :

MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SERTA KELUARGA BERKUALITAS

Crosscutting :

BAPEDALITBANG, KOMINFO, DPMPTSP, DISDUKCAPIL, DISDIKBUD, DINSOS, BPBD, PUTR, PERKIMTAN, PERTANIAN, PERIKANAN & PERINDAGTRANS

SASARAN 1 :

MENINGKATNYA NAGARI MANDIRI

MISI I

INDIKATOR SASARAN 1 :

1. PERSENTASE NAGARI MANDIRI

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN NAGARI

MISI I

1. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENETAPKAN SOP PELAYANAN
3. JUMLAH NAGARI YANG DIFASILITASI PERSIAPAN PEMEKARAN

Crosscutting : Kominfo

MENINGKATNYA MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI

1. JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGIKUTI BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN
2. JUMLAH NAGARI YANG MELAKSANAKAKAN PILWANA

MENINGKATNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGELOLA KEUANGAN NAGARI SESUAI ATURAN YANG BERLAKU

1. PERSENTASE NAGARI YANG MENYUSUN APB NAGARI TEPAT WAKTU

Crosscutting : BPKAD & Inspektorat

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET

PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN ASET LENGKAP

Crosscutting : BPKAD & Inspektorat

MENINGKATNYA NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI

JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI

PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

SUB KEGIATAN :
1. FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2. FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3. PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
4. FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
5. FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

MENINGKATNYA FASILITASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

MISI I

1. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMENUHI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU
2. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DAN LEMBAGA ADAT NAGARI

1. JUMLAH ANGGOTA LEMBAGA ADAT YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN ADAT DAN LIMBAGO ADAT
2. JUMLAH ANGGOTA LPMN YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT LAINNYA (KARANG TARUNA, KAN)
3. JUMLAH ANGGOTA PKK YANG MENGIKUTI DILKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS
4. JUMLAH PENGELOLA POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS
5. JUMLAH DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERINVENTARISASI DAN TERIDENTIFIKASI

FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. JUMLAH KELEMBAGAAN PKK YANG AKTIF DAN DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI POKJA PKK
2. JUMLAH KELEMBAGAAN POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG AKTIF

MENINGKATNYA PERAN SERTA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

1. JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGIKUTI GOTONG ROYONG
2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGIKUTI FORUM MUSYAWARAH NAGARI

MENINGKATNYA KOMPETENSI NAGARI

1. JUMLAH NAGARI YANG MENGIKUTI AJANG BERPRESTASI/LOMBA NAGARI
2. JUMLAH NAGARI YANG MENYUSUN PROFIL DESA

PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
1. IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
2. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
3. FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
4. FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

SUB KEGIATAN :
1. FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA
3. FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN

MENINGKATNYA USAHA EKONOMI MASYARAKAT NAGARI DAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)

MISI I dan MISI III

1. PERSENTASE KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF
FOMULA 1. : JUMLAH LEMBAGA EKONOMI YANG AKTIF / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI X 100%
2. PERSENTASE PENINGKATAN NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA

JUMLAH PENGURUS BUMNAG DAN KP SPAMS YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK

MENINGKATNYA PENGELOLAAN USAHA EKONOMI NAGARI / MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI NAGARI

1. JUMLAH PENGURUS UEM YANG MENGIKUTI PELATIHAN
2. JUMLAH PENGURUS UPK YANG MENGIKUTI PELATIHAN
3. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI

MENINGKATNYA KERJASAMA ANTAR NAGARI

1. JUMLAH KERJASAMA YANG DISEPAKATI
2. . JUMLAH KAWASAN PERDESAAN YANG TERBENTUK

PROGRAM : PENINGKATAN KERJASAMA DESA

KEGIATAN : FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA

SUB KEGIATAN : 1. FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA

PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

SUB KEGIATAN : 1. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA

PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : 1. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

SASARAN 2 :

TERWUJUDNYA KELUARGA BAHAGIA

Crosscutting :

DINKES, RSUD & DISDUKCAPIL

MISI 6

INDIKATOR SASARAN 2 :

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

MENINGKATNYA KEPESERTAAN PUS YANG MENGGUNAKAN KONTRASEPSI

PERSENTASE PUS YANG BER-KB

MENINGKATNYA PELAYANAN KB

1. JUMLAH AKSEPTOR KB BARU
2. JUMLAH MITRA BANGGA KENCANA

MENINGKATKAN KUALITAS FASKES PELAYANAN KB

1. JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA FASKES
2. JUMLAH NAKES YANG MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS

MENINGKATNYA PERANAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB

JUMLAH KEGIATAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB

MENINGKATNYA PENYULUHAN KB

1. JUMLAH PENYULUH KB, PPKBD DAN SUB PPKBD
2. JUMLAH PENYULUHAN KB

MENURUNKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

MISI 6

MENURUNNYA PERSENTASE ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH PUS

MENINGKATKAN RATA-RATA USIA PERKAWINAN PERTAMA

PERSENTASE PERKAWINAN PERTAMA DIATAS 20 TAHUN

MENINGKATKAN LAYANAN KONSELING

JUMLAH PUSAT KONSELING

MENINGKATNYA KEAKTIFAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)

JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN YANG AKTIF

MENINGKATNYA PENYULUHAN IBU BALITA

JUMLAH PENYULUHAN YANG DILAKUKAN

MENINGKATKAN POLA ASUH DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

JUMLAH ANAK YANG DIPANTAU TUMBUH KEMBANGNYA

PROGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK

KEGIATAN : PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
1. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA
2. PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB

PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

KEGIATAN : PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL

SUB KEGIATAN :
1. ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA
2. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KKBPK SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
3. PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG
4. PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)
5. PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK
6. PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK

KEGIATAN : PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)

SUB KEGIATAN : 1. PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)

KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
1. PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA
2. PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

KEGIATAN : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB

SUB KEGIATAN :
1. PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB
2. PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB

PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

KEGIATAN : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SUB KEGIATAN :
1. PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)
2. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DPMDPP&KB

HASIL PENILAIAN AKIP OLEH INSPEKTORAT

MENINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL DPMDPP&KB

TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN SEKTRETARIAT

MENINGKATKAN FASILITAS LAYANAN UMUM DPMDPP&KB

1.PERSENTASE LAYANAN UMUM DPMDPPKB
2. PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK

MENINGKATKAN KUALITAS SDM DPMDPP&KB

1. PERSENTASE PEMENUHAN ASN DPMDPPKB
2. PERSENTASE ASN HADIR TEPAT WAKTU
3. PERSENTASE PENGURUSAN KGB ASN TEPAT WAKTU

MENINGKATKANNYA KUALITAS PERENCANAAN DPMDPP&KB

PERSENTASE SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DPMDPP&KB YANG SELARAS DENGAN RENSTRA

MENINGKATNYA REALISASI KEUANGAN DPMDPP&KB

PERSENTASE REALISASI KEUANGAN TERHADAP ALIRAN KAS

MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPMDPP&KB

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DPMDPP&KB

TUJUAN							
INDIKATOR	KONDISI	TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT :							
A. JUMLAH KELUARGA BERRESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN TPK	-	-	15.411	22.622	30.800	39.211	58.523
B. JUMLAH LAPORAN KONVERGENSI STUNTING YANG DISAMPAIKAN NAGARI	182	182	182	182	182	182	182
2. MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN :							
PERSENTASE ANGGARAN YANG DISALURKAN KEPADA PENERIMA KPM BLT	-	-	10%	12%	15%	17,5%	20%
3. PESISIR SELATAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA FAVORIT DI PANTAI BARAT INDONESIA :							
JUMLAH NAGARI YANG DITETAPKAN SEBAGAI DESA WISATA	12	14	16	20	25	30	35
4. BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF :							
JUMLAH NAGARI YANG MENGANGGARKAN UNTUK MENDUKUNG USAHA EKONOMI KREATIF	-	-	25	30	50	75	100
5. MENINGKATKAN LITERASI MASYARAKAT :							
JUMLAH PUSTAKA NAGARI YANG AKTIF	15	20	50	55	60	70	75
6. MENINGKATNYA PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT :							
PERSENTASE ANGGARAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN	2%	5%	7%	10%	12,5%	18%	20%
7. TERWUJUDNYA KELUARGA BAHAGIA :							
A. JUMLAH KK YANG DIBANGUN JAMBAN SEHAT DARI DANA NAGARI	-	20	50	180	150	130	100
B. PERSENTASE PUS YANG MENGGUNAKAN KONTRASEPSI BER-KB	59,46%	59,87%	60,01%	61,12%	61,47%	62,14%	62,89%
C. INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	53,16%	53,24%	54,24%	54,31%	54,36%	54,51%	54,53%
8. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN SECARA MANDIRI :							
JUMLAH MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN BBGRM	6370	7280	8190	9100	10010	10920	12740
9. MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN :							
PENINGKATAN NILAI SAKIP PADA KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA	-	A	A	A	A	A	A
10. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :							
LEVEL MATURITAS SPIP	-	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,1)	3 (3,1)	3 (3,2)
11. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :							
OPINI BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12. MENINGKATNYA PERAN KELITBANGAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH :							
PERSENTASE KAJIAN KELITBANGAN YANG DIHASILKAN TERHADAP KEBUTUHAN	-	-	75%	80%	85%	90%	95%
13. MENINGKATNYA DAYA SAING ASN :							
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	-	48,78%	50%	52%	54%	56%	58%

SASARAN STRATEGIS							
1. PERSENTASE NAGARI MANDIRI	3,85	4,95	6,04	12,64	15,38	18,13	20,88
2. PERSENTASE NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)	1,10	1,65	2,75	3,85	5,49	6,59	8,24
3. INOVASI DINAS : PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN NAGARI	1	1	1	1	1	1	1
4. INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	53,16%	53,24%	54,24%	54,31%	54,36%	54,51%	54,53%

INTERMEDIATE OUT COME							
1. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	0	1	5	10	15	25
2. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENETAPKAN SOP PELAYANAN	70	75	80	85	90	95	100
3. JUMLAH NAGARI YANG DIFASILITASI PERSIAPAN PEMEKARAN	0	0	2	2	2	2	1
4. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMENUHI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU	1,65	2,20	7,14	16,48	41,21	82,42	100
5. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	1264	1269	1269	1269	1269	1269	1269
6. PERSENTASE KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF	4,19	4,84	6,45	7,10	7,74	9,35	11,29
7. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)	2,20	2,20	2,75	3,85	4,95	7,69	10,44
8. PERSENTASE PUS YANG BER-KB	59,46%	59,87%	60,01%	61,12%	61,47%	62,14%	62,89%
9. MENURUNNYA PERSENTASE ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH PUS	2,83	2,83	2,82	2,81	2,80	2,79	2,78
10. HASIL PENILAIAN AKIP OLEH INSPEKTORAT	A	A	A	A	A	A	A

OUTPUT							
1. JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGIKUTI BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN	25	30	31	35	40	45	50
2. JUMLAH NAGARI YANG MELAKSANAKAKAN PILWANA	0	31	0	151	0	0	0
3. PERSENTASE NAGARI YANG MENYUSUN APB NAGARI TEPAT WAKTU	40	42	45	47	50	57	65
4. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN ASET LENGKAP	-	-	-	-	85	90	95
5. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI	41	99	150	182	182	182	182
6. JUMLAH ANGGOTA LEMBAGA ADAT YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN ADAT DAN LIMBAGO ADAT	35	35	36	37	37	37	37
7. JUMLAH ANGGOTA LPMN YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT LAINNYA (KARANG TARUNA, KAN)	-	-	-	182	264	546	728
8. JUMLAH ANGGOTA PKK YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS	-	370	150	400	575	750	925
9. JUMLAH PENGELOLA POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS	674	670	670	670	670	670	670
10. JUMLAH DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERINVENTARISASI DAN TERIDENTIFIKASI	31	31	31	37	37	112	148
11. JUMLAH KELEMBAGAAN PKK YANG AKTIF DAN DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI POKJA PKK	15	15	15	15	15	15	15
12. JUMLAH KELEMBAGAAN POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG AKTIF	-	-	-	119	670	670	670
13. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI GOTONG ROYONG	-	-	75	80	85	95	100
14. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI FORUM MUSYAWARAH NAGARI	-	-	75	80	85	95	100
15. JUMLAH NAGARI YANG MENGIKUTI AJANG BERPRESTASI/LOMBA NAGARI	1	2	4	6	6	8	10
16. JUMLAH NAGARI YANG MENYUSUN PROFIL DESA	182	182	182	182	182	182	182
17. JUMLAH PENGURUS BUMNAG DAN KP-SPAMS YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK	80	80	95	110	120	120	120
23. JUMLAH PENGURUS UEM YANG MENGIKUTI PELATIHAN	0	30	30	30	30	30	30
24. JUMLAH PENGURUS UPK YANG MENGIKUTI PELATIHAN	40	40	40	60	60	60	60
22. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	2	5	7	9	10	12
29. JUMLAH KERJASAMA YANG DISEPAKATI	27	28	29	30	31	32	34
25. JUMLAH KAWASAN PERDESAAN YANG TERBENTUK	4	4	5	7	8	9	10
30. JUMLAH AKSEPTOR KB BARU	7393	8121	8904	9234	9564	9974	10020
35. JUMLAH MITRA BANGGA KENCANA	21	21	23	23	25	25	27
31. JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA FASKES	5	6	7	7	8	8	8
32. JUMLAH NAKES YANG MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS	8	8	8	8	8	8	8
37. JUMLAH KEGIATAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	15	15	23	30	37	44	51
33. JUMLAH PENYULUH KB, PPKBD DAN SUB PPKBD	49	91	91	91	91	91	91
34. JUMLAH PENYULUHAN KB	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648
38. PERSENTASE PERKAWINAN PERTAMA DIATAS 20 TAHUN	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,4	9,60
39. JUMLAH PUSAT KONSELING	47	49	52	54	56	58	60
40. JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN YANG AKTIF	0	40	40	40	40	40	40
41. JUMLAH PENYULUHAN YANG DILAKUKAN	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648
42. JUMLAH ANAK YANG DIPANTAU TUMBUH KEMBANGNYA	11.065	11.085	11.105	11.125	11.145	11.165	11.185
43. TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN SEKTRETARIAT	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
44. PERSENTASE LAYANAN UMUM DPMDPPKB	90	91	92	94	96	98	100
45. PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK	75	75	75	75	75	75	75
46. PERSENTASE PEMENUHAN ASN DPMDPPKB	90	91	92	94	96	98	100
47. PERSENTASE ASN HADIR TEPAT WAKTU	95	95	95	95	95	95	95
48. PERSENTASE PENGURUSAN KGB ASN TEPAT WAKTU	95	95	95	95	95	95	95
49. PERSENTASE SASARAN, PROG DAN KEGIATAN RENJA DPMDPPKB YANG SELARAS DENGAN RENSTRA	90	91	92	94	96	98	100
50. PERSENTASE REALISASI KEUANGAN TERHADAP ALIRAN KAS	100	100	100	100	100	100	100
51. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DPMDPP&KB	94	95	96	97	98	99	100

Painan, 10 Maret 2023

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19680218 199303 1 003

KERTAS KERJA EVALUASI
PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENSTRA
Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

NAMA SKPD : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**
TAHUN ANGGARAN : **2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/Bukan IKU	NO.	PROGRAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp.)		CATATAN
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Ya	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Ya	IKU	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ya	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ya	Rp 18.444.800	Rp -	
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ya	Rp 4.191.126.305	Rp -	
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ya	Rp 6.404.400	Rp -	
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ya	Rp 338.490.403	Rp -	
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ya	Rp 29.914.500	Rp -	
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ya	Rp 234.881.057	Rp -	
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ya	Rp 334.080.000	Rp -	
			2.	Persentase Nagari Mandiri	Ya	IKU	2.	Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang memiliki Pengelolaan Administrasi yang baik	Ya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Ya	Rp 100.881.200	Rp -	
							3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Ya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)	Ya	Rp 1.254.559.383	Rp -	
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Ya	3.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Ya	IKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	
3.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Ya	4.	Indeks Pembangunan Keluarga	Ya	IKU	4.	Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pengendalian Penduduk	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ya	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ya	Rp 283.315.042	Rp -	
							5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Ya	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ya	Rp 1.513.989.855	Rp -	
												Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Ya	Rp 546.000.000	Rp -	
												Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Ya	Rp 763.146.000	Rp -	
												Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Ya	Rp 3.741.841.200	Rp -	
TOTAL (Rp.)																**Rp 13.357.074.145**	**Rp -**	

Painan, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800/158.a/DPMDPPKB-PS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menghimpun dan Mengelola Data sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja;
b. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
d. Mengkoordinasikan dan Mengkonfirmasikan Hasil Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja;
e. Mengumpulkan dan Menganalisa Data serta Menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Melaporkan dan Menyampaikan Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Atasan sebagai Pertanggungjawaban.

KETIGA : Rincian Tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimna tercantum dalam Lampiran II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800/158.a/DPMDPPKB-PS/2024
TANGGAL 14 Agustus 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Denny Anggara, S.STP., M.Ec., Dev.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3.	Devi Nurita, S.E., M.Si.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4.	Jasmiati	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
5.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T.	Staf Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800/158.a/DPMDPPKB-PS/2024
TANGGAL 14 Agustus 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

1. Penanggungjawab, mempunyai tugas :
   - ⇨ Bertanggungjawab terhadap Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja Dalam Rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Ketua Tim, mempunyai tugas :
   - ⇨ Mengarahkan, Mengawasi dan Mengendalikan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
3. Sekretaris Tim, mempunyai tugas :
   - Menyusun Jadwal Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja;
   - Membentuk Ketua Tim dalam Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelaporan Kinerja;
   - Membantu Ketua Tim dalam Membuat Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
4. Anggota, mempunyai tugas :
   - Menyusun Daftar Pengumpulan Data, berupa : Format Daftar Isian yang berisi Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
   - Mengumpulkan Data Kinerja dengan Mengelompokkan dari Hasil Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
   - Menganalisa Data Kinerja dengan Mengolah Data Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerjanya;
   - Menganalisa upaya yang dilakukan dari Target Kinerja yang tidak sesuai dengan Realisasi Kinerja;
   - Menyusun Dokumen Evaluasi Penyesuaian Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Target Kinerja, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
   - Menyusun Dokumen Evaluasi Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil dan Evaluasi Realisasi Kinerja yang dicapai Berdasarkan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601
Laman: https://inspekda.pesisirselatankab.go.idPos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

BERITA ACARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KENIRJA TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai Pemberian Penghargaan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengadakan rapat dengan keputusan rapat sebagai berikut:

1. Menetapkan peringkat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 perangkat daerah se kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	89,94	A
4.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,93	A
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A
6.	Dinas Perhubungan	89,85	A
7.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89,71	A
8.	Dinas Kesehatan	89,68	A
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,31	A
10.	Dinas Pertanian	88,92	A
11.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,84	A
12.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87,97	A
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,43	A

14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,49	A
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	84,64	A
16.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84,54	A
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,72	A
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,65	A
19.	Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	82,39	A
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,9	A
21.	Dinas Perikanan dan Pangan	81,46	A
22.	Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,14	A
23.	Kantor Kecamatan IV Jurai	80,92	A
24.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	A
25.	Kantor Kecamatan Silaut	80,54	A
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	80,44	A
27.	Kantor Kecamatan Batang Kapas	80,34	A
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,31	A
29.	Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan	80,24	A
30.	Sekretariat Daerah	80,16	A
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,16	A
32.	Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	80,16	A
33.	Kantor Kecamatan Lunang	78,86	BB
34.	Kantor Kecamatan Bayang	78,8	BB
35.	Kantor Kecamatan Airpura	78,32	BB
36.	Kantor Kecamatan Pancung Soal	76,22	BB

37.	Kantor Kecamatan Lengayang	76,17	BB
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,72	BB
39.	Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	74,21	BB
40.	Kantor Kecamatan Sutera	72,48	BB
41.	Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti	65,78	B

2. Menetapkan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan peringkat I, II dan III, sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	89,94	A

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Penanggung Jawab,
Inspektur

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Rusdiyanto, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
. Pramuka Nomor 13 Telp. Fax (0751) 442273 Padang – 25136
email : dpmd.sumbarprovsumbar.go.id

BERITA ACARA PENETAPAN STATUS DESA

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Juli Tahun 2024 bertempat dikantor Gubernur Sumatera Barat, Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Provinsi hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil sebagai tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan Team Verifikasi

Mengetahui,	Mengetahui,	Dibuat oleh,
Kepala Bappeda	Kepala Dinas PMD	Koordinator TA
Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
MEDI ISWANDI, ST,MM	**AMASRUL, SH**	**WENDRIADI**
NIP. 19750502 199903 1 004	NIP. 19650505 198903 1 012	

Hasil Pemutakhiran Data IDM Desa/Nagari

Sumatera Barat Tahun 2024

Status IDM	2023		2024	
Mandiri	226	21.84%	368	35.55%
Maju	486	46.96%	445	43.00%
Berkembang	298	28.79%	212	20.48%
Tertinggal	25	2.42%	10	0.97%
Sangat Tertinggal	0	0.00%	0	0.00%
Jumlah Desa/Nagari	1035	100%	1035	100%

Pengukuran IDM Tahun 2024

KABUPATEN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TOTAL
AGAM	0	0	9	41	42	92
DHARMASRAYA	0	0	8	20	24	52
KEP. MENTAWAI	0	6	24	10	3	43
KOTA PARIAMAN	0	0	0	30	25	55
KOTA SAWAHLUNTO	0	0	1	19	7	27
LIMA PULUH KOTA	0	1	1	33	44	79
PADANG PARIAMAN	0	0	37	45	21	103
PASAMAN	0	0	23	25	14	62
PASAMAN BARAT	0	1	46	35	8	90
PESISIR SELATAN	0	0	31	95	56	182
SIJUNJUNG	0	0	0	21	41	62
SOLOK	0	2	25	28	19	74
SOLOK SELATAN	0	0	5	19	15	39
TANAH DATAR	0	0	2	24	49	75
JUMLAH DESA/NAGARI	**0**	**10**	**212**	**445**	**368**	**1035**

PERINGKAT PROVINSI IDM STATUS MANDIRI TAHUN 2024

KAB/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
LIMA PULUH KOTA	HARAU	1307052007	SARILAMAK	0,9714	0,9667	1	0,9794	MANDIRI
TANAH DATAR	LIMA KAUM	1304042001	BARINGIN	0,9714	0,9833	0,9333	0,9627	MANDIRI
LIMA PULUH KOTA	SITUJUAH LIMO NAGARI	1307102001	SITUJUAH BATUA	0,9543	1	0,9333	0,9625	MANDIRI
DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	1310032007	SUNGAI RUMBAI TIMUR	0,9829	0,9667	0,9333	0,961	MANDIRI
LIMA PULUH KOTA	LUAK	1307042002	MUNGO	0,9657	0,9833	0,9333	0,9608	MANDIRI
KOTA SAWAHLUNTO	SILUNGKANG	1373032003	SILUNGKANG TIGO	0,8686	1	1	0,9562	MANDIRI
SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	1303042001	MUARO	0,9829	1	0,8667	0,9498	MANDIRI
SOLOK	GUNUNG TALANG	1302072001	CUPAK	0,96	0,95	0,9333	0,9478	MANDIRI
AGAM	LUBUK BASUNG	1306022001	LUBUK BASUNG	0,9657	1	0,8667	0,9441	MANDIRI
SOLOK	BUKIT SUNDI	1302082001	MUARO PANEH	0,8914	0,9333	1	0,9416	MANDIRI

PERINGKAT PROVINSI IDM STATUS MAJU TAHUN 2024

KAB/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
KEPULAUAN MENTAWAI	SIPORA SELATAN	1309022007	MATOBE	0,8629	0,7167	0,8667	0,8154	MAJU
AGAM	KAMANG MAGEK	1306152003	KAMANG MUDIAK	0,8457	0,8	0,8	0,8152	MAJU
LIMA PULUH KOTA	SULIKI	1307012004	SULIKI	0,8457	0,9333	0,6667	0,8152	MAJU
PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	1305062001	CAMPAGO	0,8286	0,8833	0,7333	0,8151	MAJU
PESISIR SELATAN	SILAUT	1301152003	SUNGAI SARIK	0,8114	0,7	0,9333	0,8149	MAJU
TANAH DATAR	BATIPUH	1304022005	GUNUANG RAJO	0,8114	0,7	0,9333	0,8149	MAJU
PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	1305022003	SUNGAI BULUAH	0,9086	0,8667	0,6667	0,814	MAJU
KOTA SAWAHLUNTO	TALAWI	1373042009	SALAK	0,8914	0,6833	0,8667	0,8138	MAJU
KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	1377022013	TUNGKAL SELATAN	0,8571	0,7833	0,8	0,8135	MAJU
LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	1307072005	DURIAN TINGGI	0,84	0,7333	0,8667	0,8133	MAJU

PERINGKAT PROVINSI IDM STATUS BERKEMBANG TAHUN 2024

KAB/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	1305072001	KURANJI HULU	0,7714	0,6833	0,6667	0,7071	BERKEMBANG
SOLOK	KUBUNG	1302102005	GANTUANG CIRI	0,7543	0,7667	0,6	0,707	BERKEMBANG
PESISIR SELATAN	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122004	PANCUANG TABA	0,7371	0,5833	0,8	0,7068	BERKEMBANG
PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	1305062003	CAMPAGO BARAT	0,7371	0,5167	0,8667	0,7068	BERKEMBANG
PADANG PARIAMAN	ULAKAN TAPAKIH	1305102002	ULAKAN	0,7371	0,5833	0,8	0,7068	BERKEMBANG
PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142001	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	0,7029	0,6167	0,8	0,7065	BERKEMBANG
PESISIR SELATAN	BAYANG	1301062010	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	0,8514	0,6667	0,6	0,706	BERKEMBANG
PASAMAN BARAT	KINALI	1312052007	TANDIKEK	0,8171	0,6333	0,6667	0,7057	BERKEMBANG
PESISIR SELATAN	RANAH PESISIR	1301022009	PELANGAI KACIAK	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG
PASAMAN BARAT	KINALI	1312052017	LIMAU PURUT	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG

PERINGKAT PROVINSI IDM STATUS TERTINGGAL TAHUN 2024

KAB/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
KEPULAUAN MENTAWAI	SIBERUT BARAT	1309052002	SIMALEGI	0,6686	0,3	0,8	0,5895	TERTINGGAL
LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	1307072007	GALUGUA	0,6686	0,4833	0,6	0,584	TERTINGGAL
KEPULAUAN MENTAWAI	SIBERUT SELATAN	1309032007	MADOBAG	0,8057	0,4333	0,4667	0,5686	TERTINGGAL
SOLOK	TIGO LURAH	1302182004	TANJUNG BALIK SUMISO	0,6629	0,4833	0,5333	0,5598	TERTINGGAL
KEPULAUAN MENTAWAI	SIBERUT BARAT	1309052001	SIMATALU	0,6571	0,2167	0,8	0,5579	TERTINGGAL
PASAMAN BARAT	SUNGAI AUR	1312092007	SIKILANG SUNGAI AUR SELATAN	0,6629	0,5333	0,4667	0,5543	TERTINGGAL
KEPULAUAN MENTAWAI	SIBERUT SELATAN	1309032005	MATOTONAN	0,7543	0,3667	0,5333	0,5514	TERTINGGAL
SOLOK	TIGO LURAH	1302182003	GARABAK DATA	0,5371	0,5333	0,5333	0,5346	TERTINGGAL
KEPULAUAN MENTAWAI	SIBERUT UTARA	1309042003	BOJAKAN	0,6457	0,2833	0,6667	0,5319	TERTINGGAL
KEPULAUAN MENTAWAI	SIBERUT BARAT	1309052003	SIGAPOKNA	0,7143	0,2333	0,6	0,5159	TERTINGGAL

INDEKS DESA MEMBANGUN

(IDM) TAHUN 2024

PEMERINTAH SE-NAGARI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDAHULUAN

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berikut Landasan hukum terkait Indeks Desa Membangun (IDM) :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024,
5. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

GAMBARAN UMUM DAN REKAPITULASI IDM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

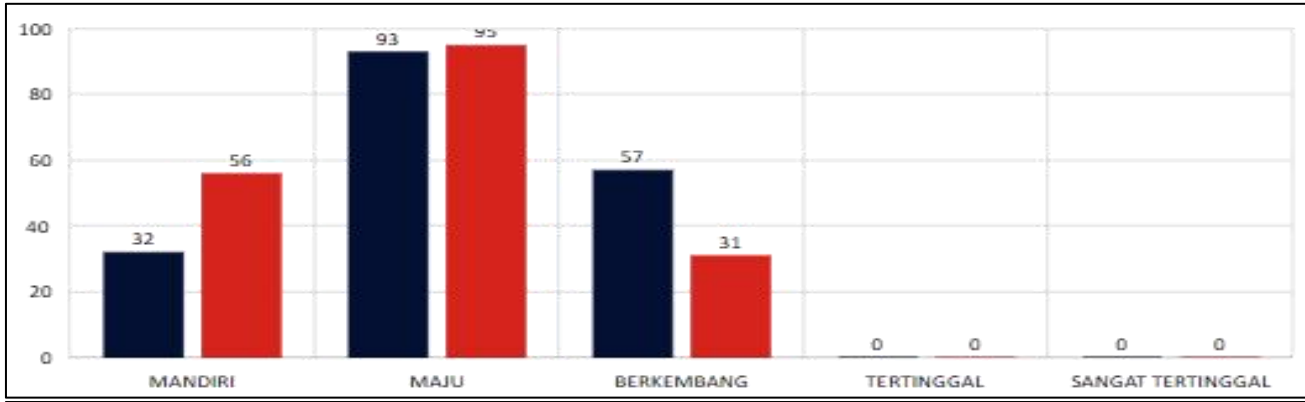

	2023		2024	
MANDIRI	32	17.58%	56	30.77%
MAJU	93	51.10%	95	52.20%
BERKEMBANG	57	31.32%	31	17.03%
TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%

NO	ID KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	INPUTAN BELUM SELESAI	BELUM VERIFIKASI	SUDAH DIVERIFIKASI	PERSENTASE	APBDES	DANA DESA	PENDUDUK	KK MISKIN	LUAS WIL (Ha)
1	130101	PANCUNG SOAL	10	0	0	10	100%	14.684.476.910	9.592.443.000	32.237	1.810	54.742,00
2	130102	RANAH PESISIR	10	0	0	10	100%	14.968.090.338	9.270.702.000	34.969	4.096	56.281,00
3	130103	LENGAYANG	9	0	0	9	100%	16.996.293.124	11.108.579.000	69.376	6.840	63.296,00
4	130104	BATANG KAPAS	9	0	0	9	100%	13.825.678.029	8.781.934.000	39.829	2.938	27.755,00
5	130105	IV JURAI	20	0	0	20	100%	28.216.235.342	17.345.154.000	54.825	3.729	36.839,00
6	130106	BAYANG	17	0	0	17	100%	23.626.643.741	14.557.769.000	45.411	6.026	8.065,00
7	130107	KOTO XI TARUSAN	23	0	0	23	100%	31.009.183.107	19.082.650.000	55.697	6.356	43.770,00
8	130108	SUTERA	12	0	0	12	100%	19.393.889.314	12.735.407.000	60.926	4.093	56.982,00
9	130109	UNGGO SARI BAGANTI	16	0	0	16	100%	23.721.381.084	15.228.149.000	52.989	4.645	55.767,00
10	130110	LUNANG	10	0	0	10	100%	14.322.267.719	8.808.570.000	23.015	1.678	45.673,00
11	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	10	0	0	10	100%	15.510.421.122	7.745.890.000	17.141	494	18.746,00
12	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	6	0	0	6	100%	7.873.041.722	4.713.148.000	8.458	925	24.233,00
13	130113	AIRPURA	10	0	0	10	100%	14.001.848.394	8.678.233.000	19.792	1.089	38.011,00
14	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	0	0	10	100%	13.128.084.908	8.070.318.000	16.137	1.177	28.197,00
15	130115	SILAUT	10	0	0	10	100%	12.925.794.741	7.475.070.000	15.713	387	102.104,81
		JUMLAH	182	0	0	182	100%	264.203.329.595	163.194.016.000	546.515	46.283	660.461,81

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi, No. 200, Painan Kode Pos: 25611 Telp. (0756) 21293
E-mail: dpmdppkbpessel@gmail.com

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Juni Tahun 2024 bertempat di:

1. Kabupaten : PESISIR SELATAN
2. Provinsi : SUMATERA BARAT

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda Kabupaten	Plt. Kepala DPMD Kabupaten	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	Tenaga Ahli Kabupaten PIC IDM
(HADI SUSILO, S.STP., M.Si)	(SALMAN ALFARISI, S.STP, M.Si.)	(SYAMSUL EFFENDI, S.Pd., M.Si.)	(EKO YULIANBRIANTORO, S.Pi.)
NIP. 19770522 199701 1 001	NIP. 19780215 199802 1 001		

Tenaga Ahli Kabupaten	Tenaga Ahli Kabupaten	Tenaga Ahli Kabupaten	Tenaga Ahli Kabupaten
(ATMAWATI, S.E.)	(EKA PAN BUDI, S.T., M.M.)	(Ir. ANRA VIKTOR HASTIAN)	(PEN ANDRI, S.H.I.)

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012001	INDERAPURA	0,846	0,75	0,667	0,7541	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012002	MUARO SAKAI INDERAPURA	0,846	0,783	0,8	0,8097	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012003	TIGA SEPAKAT INDERAPURA	0,749	0,667	1	0,8051	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012004	INDERAPURA BARAT	0,84	0,633	0,933	0,8022	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012005	KUDO-KUDO INDERAPURA	0,846	0,933	0,933	0,9041	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012006	INDERAPURA SELATAN	0,863	0,767	0,867	0,8321	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012009	SIMPANG LAMA INDERAPURA	0,88	0,867	0,733	0,8267	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012010	TIGO SUNGAI INDERAPURA	0,903	0,783	0,867	0,851	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012011	TLUK AMPLU INDERAPURA	0,829	0,733	0,867	0,8095	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130101	PANCUNG SOAL	1301012012	INDERAPURA TENGAH	0,88	0,7	0,8	0,7933	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022001	PELANGAI	0,749	0,983	1	0,9106	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022002	SUNGAI TUNU	0,697	0,7	0,733	0,7102	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022003	SUNGAI TUNU UTARA	0,806	0,8	0,533	0,713	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022004	SUNGAI TUNU BARAT	0,686	0,6	0,867	0,7175	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022005	NYIUR MELAMBAI PELANGAI	0,629	0,517	0,933	0,6929	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022006	SUNGAI LIKU PELANGAI	0,657	0,733	0,667	0,6857	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022007	KOTO VIII PELANGAI	0,897	0,683	0,867	0,8157	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022008	PELANGAI GADANG	0,674	0,55	0,867	0,697	BERKEMBANG

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022009	PELANGAI KACIAK	0,783	0,667	0,667	0,7054	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130102	RANAH PESISIR	1301022010	PASIA PELANGAI	0,749	0,783	0,667	0,7329	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032001	KAMBANG	0,869	0,833	0,933	0,8784	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032002	LAKITAN	0,806	0,867	0,933	0,8686	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032003	KAMBANG UTARA	0,726	0,733	0,733	0,7308	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032004	KAMBANG TIMUR	0,811	0,8	0,8	0,8038	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032005	KAMBANG BARAT	0,846	0,817	0,867	0,843	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032006	LAKITAN UTARA	0,897	0,833	0,867	0,8657	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032007	LAKITAN SELATAN	0,777	0,783	0,8	0,7868	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032008	LAKITAN TIMUR	0,794	0,767	0,8	0,787	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130103	LENGAYANG	1301032009	LAKITAN TENGAH	0,72	0,65	0,867	0,7456	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042001	IV KOTO HILIE	0,829	0,85	0,8	0,8262	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042002	IV KOTO MUDIEK	0,817	0,533	0,8	0,7168	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042003	TALUAK	0,811	0,717	0,867	0,7983	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042004	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	0,863	0,667	1	0,8432	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042005	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	0,817	0,683	0,6	0,7002	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042006	TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	0,749	0,583	0,8	0,7106	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042007	TUIK IV KOTO MUDIEK	0,794	0,583	0,6	0,6592	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042008	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	0,8	0,717	0,933	0,8167	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130104	BATANG KAPAS	1301042009	TALUK TIGO SAKATO	0,703	0,617	0,867	0,7287	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052001	PAINAN	0,909	0,867	1	0,9251	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052002	TAMBANG	0,869	0,633	0,8	0,7673	MAJU

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052003	SALIDO	0,983	0,783	0,933	0,8998	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052004	LUMPO	0,84	0,8	0,867	0,8356	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052005	BUNGA PASANG SALIDO	0,857	0,7	1	0,8524	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052006	SAGO SALIDO	0,96	0,85	0,933	0,9144	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052007	SALIDO SARI BULAN	0,834	0,7	0,867	0,8003	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052008	KOTO RAWANG	0,84	0,617	0,867	0,7744	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052009	LIMAU GADANG LUMPO	0,766	0,617	0,8	0,7275	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052010	BATU KUNIK LUMPO	0,817	0,6	0,867	0,7613	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052011	TARATAK TANGAH LUMPO	0,766	0,717	0,8	0,7608	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052012	AMPUAN LUMPO	0,851	0,733	0,867	0,8171	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052013	AMPANG TAREH LUMPO	0,914	0,55	0,933	0,7992	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052014	BALAI SINAYAN LUMPO	0,766	0,5	0,933	0,733	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052015	SUNGAI GAYO LUMPO	0,749	0,633	0,8	0,7273	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052016	SUNGAI SARIAK LUMPO	0,811	0,6	0,867	0,7594	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052017	BUKIK KACIAK LUMPO	0,817	0,6	0,8	0,739	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052018	GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	0,771	0,617	0,933	0,7738	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052019	PAINAN SELATAN PAINAN	0,949	0,867	0,933	0,9162	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130105	IV JURAI	1301052020	PAINAN TIMUR PAINAN	0,891	0,8	1	0,8971	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062005	KOTO BERAPAK	0,823	0,867	0,8	0,8298	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062006	TALAOK	0,771	0,767	0,8	0,7794	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062007	PASAR BARU	0,92	0,95	0,8	0,89	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062008	GURUN PANJANG	0,829	0,6	0,6	0,6762	BERKEMBANG

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062009	API-API PASAR BARU	0,794	0,567	0,867	0,7425	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062010	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	0,851	0,667	0,6	0,706	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062011	ASAM KAMBA PASAR BARU	0,737	0,533	0,6	0,6235	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062012	SAWAH LAWEH PASAR BARU	0,811	0,567	0,867	0,7483	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062013	KAPEH PANJI JAYA TALAOK	0,806	0,667	0,6	0,6908	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062014	AUR BEGALUNG TALAOK	0,84	0,65	0,6	0,6967	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062015	KAPELGAM KOTO BERAPAK	0,829	0,65	0,6	0,6929	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062016	KOTO BARU KOTO BERAPAK	0,703	0,6	0,8	0,701	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062017	KUBANG KOTO BERAPAK	0,76	0,633	0,6	0,6644	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062018	KAPUJAN KOTO BERAPAK	0,72	0,567	0,8	0,6956	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062019	GURUN PANJANG UTARA	0,749	0,633	0,8	0,7273	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062020	GURUN PANJANG BARAT	0,771	0,567	0,6	0,646	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130106	BAYANG	1301062021	GURUN PANJANG SELATAN	0,749	0,683	0,667	0,6995	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072001	SIGUNTUR	0,874	0,65	0,6	0,7081	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072002	SUNGAI PINANG	0,697	0,6	0,867	0,7213	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072003	DUKU	0,811	0,733	0,8	0,7816	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072004	BATU HAMPA	0,806	0,733	0,8	0,7797	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072005	NANGGALO	0,771	0,933	0,8	0,8349	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072006	AMPANG PULAI	0,817	0,717	0,933	0,8224	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072007	KAPUH	0,817	0,733	0,8	0,7835	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072008	BARUNG-BARUNG BALANTAI	0,891	0,9	0,8	0,8638	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072009	BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN	0,783	0,75	0,733	0,7554	MAJU

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072010	MANDEH	0,823	0,767	0,533	0,7076	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072011	KAPUAH UTARA	0,817	0,8	0,6	0,739	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072012	TARATAK SUNGAI LUNDANG	0,749	0,583	0,867	0,7329	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072013	SIGUNTUR TUA	0,8	0,683	0,667	0,7167	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072014	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	0,794	0,667	0,733	0,7314	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072015	DUKU UTARA	0,76	0,683	0,533	0,6589	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072016	PULAU KARAM AMPANG PULAI	0,823	0,717	0,8	0,7798	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072017	JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI	0,829	0,75	0,933	0,8373	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072018	CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	0,771	0,7	0,667	0,7127	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072019	SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	0,737	0,65	0,8	0,729	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072020	BATU HAMPAR SELATAN	0,857	0,833	0,8	0,8302	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072021	BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	0,811	0,75	0,533	0,6983	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072022	BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	0,771	0,633	0,733	0,7127	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130107	KOTO XI TARUSAN	1301072023	SETARA NANGGALO	0,84	0,633	0,6	0,6911	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082001	TARATAK	0,834	0,65	0,8	0,7614	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082002	SURANTIH	0,84	0,9	0,733	0,8244	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082003	AMPING PARAK	0,8	0,85	1	0,8833	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082004	AMPING PARAK TIMUR	0,84	0,667	0,8	0,7689	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082005	KOTO TARATAK	0,817	0,667	0,867	0,7835	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082006	LANSANO TARATAK	0,777	0,717	0,933	0,809	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082007	AUR DURI SURANTIH	0,823	0,75	0,667	0,7465	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082008	RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH	0,731	0,6	0,8	0,7105	MAJU

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082009	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	0,8	0,567	0,8	0,7222	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082010	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	0,817	0,65	0,667	0,7113	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082011	GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH	0,726	0,55	0,8	0,6919	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130108	SUTERA	1301082012	GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH	0,629	0,6	0,667	0,6317	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092001	PUNGGASAN	0,909	0,817	0,867	0,864	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092002	AIR HAJI	0,886	0,817	1	0,9008	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092003	PUNGGASAN UTARA	0,789	0,717	0,8	0,7684	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092004	PUNGGASAN TIMUR	0,817	0,6	0,533	0,6502	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092005	PADANG XI PUNGGASAN	0,783	0,667	0,8	0,7498	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092006	LAGAN MUDIK PUNGGASAN	0,829	0,667	0,933	0,8095	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092007	LAGAN HILIR PUNGGASAN	0,771	0,783	0,667	0,7405	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092008	AIR HAJI TENGGARA	0,749	0,633	0,8	0,7273	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092009	PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	0,8	0,767	0,6	0,7222	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092010	PASAR BUKIT AIR HAJI	0,84	0,583	0,8	0,7411	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092011	AIR HAJI BARAT	0,886	0,7	0,867	0,8175	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092012	AIR HAJI TENGAH	0,777	0,617	0,733	0,709	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092013	RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	0,817	0,733	0,8	0,7835	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092014	MUARA GADANG AIR HAJI	0,686	0,583	0,867	0,7119	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092015	SUNGAI SIRAH AIR HAJI	0,806	0,517	0,8	0,7075	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092016	MUARA KANDIS PUNGGASAN	0,726	0,767	0,8	0,7641	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102001	LUNANG	0,909	0,867	0,867	0,8806	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102003	LUNANG UTARA	0,726	0,867	0,8	0,7975	MAJU

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102004	LUNANG SELATAN	0,943	0,883	0,733	0,8532	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102005	LUNANG BARAT	0,886	0,717	0,867	0,823	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102015	SINDANG LUNANG	0,84	0,75	0,867	0,8189	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102016	PONDOK PARIAN LUNANG	0,874	0,75	0,867	0,8303	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102017	LUNANG TENGAH	0,834	0,767	0,867	0,8225	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102018	LUNANG SATU	0,891	0,9	0,667	0,8194	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102019	LUNANG DUA	0,857	0,783	0,933	0,8579	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130110	LUNANG	1301102020	LUNANG TIGA	0,863	0,817	0,867	0,8487	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112001	TAPAN	0,783	0,667	0,867	0,7721	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112002	PASAR TAPAN	0,949	0,85	0,933	0,9106	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112007	BATANG ARAH TAPAN	0,874	0,733	0,8	0,8025	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112008	AMPANG TULAK TAPAN	0,811	0,65	0,933	0,7983	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112009	TANJUNG PONDOK TAPAN	0,811	0,717	0,733	0,7538	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112010	BATANG BETUNG TAPAN	0,886	0,883	0,667	0,8119	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112016	BUKIT BUAI TAPAN	0,863	0,533	0,933	0,7765	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112017	RIAK DANAU TAPAN	0,869	0,967	0,8	0,8784	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112018	KOTO ANAU TAPAN	0,874	0,65	1	0,8414	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112019	DUSUN BARU TAPAN	0,783	0,717	0,667	0,7221	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122001	PULUIK-PULUIK	0,84	0,8	0,933	0,8578	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122002	KOTO RANAH	0,777	0,733	0,867	0,7924	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122003	MUARO AIE	0,669	0,667	0,867	0,734	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122004	PANCUANG TABA	0,737	0,583	0,8	0,7068	BERKEMBANG

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122005	PULUIK-PULUIK SELATAN	0,811	0,717	0,933	0,8205	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122006	LIMAU GADANG PANCUNG TABA	0,714	0,467	0,867	0,6825	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132001	INDERAPURA UTARA	0,897	0,617	0,933	0,8157	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132002	MUARA INDERAPURA	0,84	0,783	0,933	0,8522	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132003	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	0,88	0,85	0,667	0,7989	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132004	LALANG PANJANG INDERAPURA	0,903	0,817	1	0,9065	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132005	PALOKAN INDERAPURA	0,909	0,7	0,8	0,8029	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132006	LUBUK BETUNG INDERAPURA	0,766	0,55	0,933	0,7497	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132007	TLUK KUALO INDERAPURA	0,794	0,667	0,867	0,7759	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132008	TANAH BAKALI INDERAPURA	0,92	0,7	0,933	0,8511	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132009	INDERAPURA TIMUR	0,749	0,717	1	0,8217	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130113	AIRPURA	1301132010	PULAU RAJO INDERAPURA	0,697	0,617	0,933	0,749	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142001	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	0,703	0,617	0,8	0,7065	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142002	LIMAU PURUT TAPAN	0,777	0,567	0,667	0,6702	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142003	TALANG BALARIK TAPAN	0,697	0,6	0,867	0,7213	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142004	TEBING TINGGI TAPAN	0,897	0,9	0,6	0,799	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142005	BINJAI TAPAN	0,777	0,6	0,667	0,6813	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142006	SUNGAI PINANG TAPAN	0,777	0,667	0,667	0,7035	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142007	TALANG KOTO PULAI TAPAN	0,84	0,533	0,6	0,6578	BERKEMBANG
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142008	KAMPUNG TENGAH TAPAN	0,937	0,783	0,6	0,7735	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142009	KUBU TAPAN	0,869	0,75	0,667	0,7617	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142010	SIMPANG GUNUNG TAPAN	0,749	0,683	0,667	0,6995	BERKEMBANG

13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152001	SILAUT	0,846	0,667	0,867	0,793	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152002	SUNGAI SIRAH	0,8	0,883	0,867	0,85	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152003	SUNGAI SARIK	0,811	0,7	0,933	0,8149	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152004	SUNGAI PULAI	0,949	0,65	0,8	0,7995	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152005	PASIR BINJAI	0,794	0,75	0,933	0,8259	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152006	TALANG BINJAI	0,806	0,583	0,867	0,7519	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152007	DURIAN SERIBU	0,823	0,567	0,933	0,7743	MAJU
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152008	LUBUK BUNTA	0,834	0,867	0,867	0,8559	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152009	AIR HITAM	0,817	0,7	0,933	0,8168	MANDIRI
13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	130115	SILAUT	1301152010	SAMBUNGO	0,771	0,667	0,733	0,7238	MAJU

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda Kabupaten

(HADI SUSILO, S.STP., M.Si)
NIP. 19770522 199701 1 001

Plt. Kepala DPMD Kabupaten

(SALMAN ALFARISI, S.STP, M.Si.)
NIP. 19780215 199802 1 001

Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten

(SYAMSUL EFFENDI, S.Pd., M.Si.)

Tenaga Ahli Kabupaten PIC IDM

(EKO YULIANBRIANTORO, S.Pi.)

Tenaga Ahli Kabupaten

(ATMAWATI, S.E.)

Tenaga Ahli Kabupaten

(EKA PAN BUDI, S.T., M.M.)

Tenaga Ahli Kabupaten

(Ir. ANRA VIKTOR HASTIAN)

Tenaga Ahli Kabupaten

(PEN ANDRI, S.H.I.)

KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

INDEKS KOMPOSIT	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	REKOMENDASI LEVEL KABUPATEN		
				Super Prioritas (0,00% - 50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	Terpenuhi (0,76% - 1.00%)
SOSIAL (IKS)	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	0	0	182
			Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain)	45	78	59
		Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	16	16	150
			Tingkat Aktivitas Posyandu	2	1	179
		Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	49	84	49
	PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	0	0	182
			Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	8	1	173
			Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	30	9	143
		Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD	8	0	174
			Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	125	0	57
			Kegiatan Kursus	118	0	64
		Akses Pengetahuan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa	35	0	147
	MODAL SOSIAL	Solidaritas Sosial	Kebiasaan Gotong Royong	0	1	181
			Keterbukaan Ruang Publik	32	0	150
			Terdapat Kelompok Olahraga	112	37	33
			Terdapat Kegiatan Olahraga	68	54	60
		Toleransi	Keragaman Suku/Etnis di Desa	66	0	116
			Bahasa Sehari-hari Warga Desa	77	0	105
			Agama Mayoritas Warga Desa	145	0	37
		Rasa Aman Warga Desa	Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa	11	0	171
			Partisipasi Warga Siskamling	14	0	168
			Kejadian Perkelahian Massal di desa	22	0	160
		Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	0	160	22
			Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)	1	7	174
	PERMUKIMAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Mayoritas Warga MemilikI Sumber Air layak Minum	0	2	180
			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	0	1	181
		Akses ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas Warga Memiliki Jamban	0	2	180
			Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	11	0	171
		Akses Ke Fasilitas Listrik	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik	6	36	140
		Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat	4	26	152
			Akses Internet di Kantor Desa	13	0	169
			Terdapat Akses Internet untuk warga	13	0	169
EKONOMI (IKE)	KERAGAMAN PRODUKSI	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk	12	9	161
	PERDAGANGAN	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)	26	4	152
			Terdapat Pasar Desa	110	9	63
			Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)	3	1	178
	AKSES DISTRIBUSI	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	109	36	37
	AKSES KREDIT	Akkses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR	118	30	34
			Akses Penduduk ke Kredit	48	76	58
	LEMBAGA EKONOMI	Lembaga Ekonomi	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes	1	87	94
			Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	2	135	45
	KETERBUKAAN WILAYAH	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	57	76	49
			Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	2	24	156
			Kualitas Jalan Desa	0	4	178
LINGKUNGAN (IKL)	KUALTIAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	6	4	172
	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	2	37	143
		Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	31	47	104

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA IDM 2024 UNTUK PENDANAAN 2025 SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN

KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
130101	PANCUNG SOAL	1301012001	INDERAPURA	2024	0,8457	0,75	0,6667	0,7541	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012002	MUARO SAKAI INDERAPURA	2024	0,8457	0,7833	0,8	0,8097	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012003	TIGA SEPAKAT INDERAPURA	2024	0,7486	0,6667	1	0,8051	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012004	INDERAPURA BARAT	2024	0,84	0,6333	0,9333	0,8022	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012005	KUDO-KUDO INDERAPURA	2024	0,8457	0,9333	0,9333	0,9041	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012006	INDERAPURA SELATAN	2024	0,8629	0,7667	0,8667	0,8321	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012009	SIMPANG LAMA INDERAPURA	2024	0,88	0,8667	0,7333	0,8267	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012010	TIGO SUNGAI INDERAPURA	2024	0,9029	0,7833	0,8667	0,851	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012011	TLUK AMPLU INDERAPURA	2024	0,8286	0,7333	0,8667	0,8095	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012012	INDERAPURA TENGAH	2024	0,88	0,7	0,8	0,7933	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022001	PELANGAI	2024	0,7486	0,9833	1	0,9106	MANDIRI
130102	RANAH PESISIR	1301022002	SUNGAI TUNU	2024	0,6971	0,7	0,7333	0,7102	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022003	SUNGAI TUNU UTARA	2024	0,8057	0,8	0,5333	0,713	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022004	SUNGAI TUNU BARAT	2024	0,6857	0,6	0,8667	0,7175	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022005	NYIUR MELAMBAI PELANGAI	2024	0,6286	0,5167	0,9333	0,6929	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022006	SUNGAI LIKU PELANGAI	2024	0,6571	0,7333	0,6667	0,6857	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022007	KOTO VIII PELANGAI	2024	0,8971	0,6833	0,8667	0,8157	MANDIRI
130102	RANAH PESISIR	1301022008	PELANGAI GADANG	2024	0,6743	0,55	0,8667	0,697	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022009	PELANGAI KACIAK	2024	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022010	PASIA PELANGAI	2024	0,7486	0,7833	0,6667	0,7329	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032001	KAMBANG	2024	0,8686	0,8333	0,9333	0,8784	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032002	LAKITAN	2024	0,8057	0,8667	0,9333	0,8686	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032003	KAMBANG UTARA	2024	0,7257	0,7333	0,7333	0,7308	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032004	KAMBANG TIMUR	2024	0,8114	0,8	0,8	0,8038	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032005	KAMBANG BARAT	2024	0,8457	0,8167	0,8667	0,843	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032006	LAKITAN UTARA	2024	0,8971	0,8333	0,8667	0,8657	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032007	LAKITAN SELATAN	2024	0,7771	0,7833	0,8	0,7868	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032008	LAKITAN TIMUR	2024	0,7943	0,7667	0,8	0,787	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032009	LAKITAN TENGAH	2024	0,72	0,65	0,8667	0,7456	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042001	IV KOTO HILIE	2024	0,8286	0,85	0,8	0,8262	MANDIRI
130104	BATANG KAPAS	1301042002	IV KOTO MUDIEK	2024	0,8171	0,5333	0,8	0,7168	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042003	TALUAK	2024	0,8114	0,7167	0,8667	0,7983	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042004	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	2024	0,8629	0,6667	1	0,8432	MANDIRI
130104	BATANG KAPAS	1301042005	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	2024	0,8171	0,6833	0,6	0,7002	BERKEMBANG
130104	BATANG KAPAS	1301042006	TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	2024	0,7486	0,5833	0,8	0,7106	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042007	TUIK IV KOTO MUDIEK	2024	0,7943	0,5833	0,6	0,6592	BERKEMBANG
130104	BATANG KAPAS	1301042008	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	2024	0,8	0,7167	0,9333	0,8167	MANDIRI
130104	BATANG KAPAS	1301042009	TALUK TIGO SAKATO	2024	0,7029	0,6167	0,8667	0,7287	MAJU
130105	IV JURAI	1301052001	PAINAN	2024	0,9086	0,8667	1	0,9251	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052002	TAMBANG	2024	0,8686	0,6333	0,8	0,7673	MAJU
130105	IV JURAI	1301052003	SALIDO	2024	0,9829	0,7833	0,9333	0,8998	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052004	LUMPO	2024	0,84	0,8	0,8667	0,8356	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052005	BUNGA PASANG SALIDO	2024	0,8571	0,7	1	0,8524	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052006	SAGO SALIDO	2024	0,96	0,85	0,9333	0,9144	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052007	SALIDO SARI BULAN	2024	0,8343	0,7	0,8667	0,8003	MAJU
130105	IV JURAI	1301052008	KOTO RAWANG	2024	0,84	0,6167	0,8667	0,7744	MAJU
130105	IV JURAI	1301052009	LIMAU GADANG LUMPO	2024	0,7657	0,6167	0,8	0,7275	MAJU
130105	IV JURAI	1301052010	BATU KUNIK LUMPO	2024	0,8171	0,6	0,8667	0,7613	MAJU
130105	IV JURAI	1301052011	TARATAK TANGAH LUMPO	2024	0,7657	0,7167	0,8	0,7608	MAJU
130105	IV JURAI	1301052012	AMPUAN LUMPO	2024	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052013	AMPANG TAREH LUMPO	2024	0,9143	0,55	0,9333	0,7992	MAJU
130105	IV JURAI	1301052014	BALAI SINAYAN LUMPO	2024	0,7657	0,5	0,9333	0,733	MAJU
130105	IV JURAI	1301052015	SUNGAI GAYO LUMPO	2024	0,7486	0,6333	0,8	0,7273	MAJU
130105	IV JURAI	1301052016	SUNGAI SARIAK LUMPO	2024	0,8114	0,6	0,8667	0,7594	MAJU
130105	IV JURAI	1301052017	BUKIK KACIAK LUMPO	2024	0,8171	0,6	0,8	0,739	MAJU
130105	IV JURAI	1301052018	GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	2024	0,7714	0,6167	0,9333	0,7738	MAJU
130105	IV JURAI	1301052019	PAINAN SELATAN PAINAN	2024	0,9486	0,8667	0,9333	0,9162	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052020	PAINAN TIMUR PAINAN	2024	0,8914	0,8	1	0,8971	MANDIRI
130106	BAYANG	1301062005	KOTO BERAPAK	2024	0,8229	0,8667	0,8	0,8298	MANDIRI
130106	BAYANG	1301062006	TALAOK	2024	0,7714	0,7667	0,8	0,7794	MAJU
130106	BAYANG	1301062007	PASAR BARU	2024	0,92	0,95	0,8	0,89	MANDIRI
130106	BAYANG	1301062008	GURUN PANJANG	2024	0,8286	0,6	0,6	0,6762	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062009	API-API PASAR BARU	2024	0,7943	0,5667	0,8667	0,7425	MAJU
130106	BAYANG	1301062010	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	2024	0,8514	0,6667	0,6	0,706	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062011	ASAM KAMBA PASAR BARU	2024	0,7371	0,5333	0,6	0,6235	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062012	SAWAH LAWEH PASAR BARU	2024	0,8114	0,5667	0,8667	0,7483	MAJU
130106	BAYANG	1301062013	KAPEH PANJI JAYA TALAOK	2024	0,8057	0,6667	0,6	0,6908	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062014	AUR BEGALUNG TALAOK	2024	0,84	0,65	0,6	0,6967	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062015	KAPELGAM KOTO BERAPAK	2024	0,8286	0,65	0,6	0,6929	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062016	KOTO BARU KOTO BERAPAK	2024	0,7029	0,6	0,8	0,701	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062017	KUBANG KOTO BERAPAK	2024	0,76	0,6333	0,6	0,6644	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062018	KAPUJAN KOTO BERAPAK	2024	0,72	0,5667	0,8	0,6956	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062019	GURUN PANJANG UTARA	2024	0,7486	0,6333	0,8	0,7273	MAJU

130106	BAYANG	1301062020	GURUN PANJANG BARAT	2024	0,7714	0,5667	0,6	0,646	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062021	GURUN PANJANG SELATAN	2024	0,7486	0,6833	0,6667	0,6995	BERKEMBANG
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072001	SIGUNTUR	2024	0,8743	0,65	0,6	0,7081	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072002	SUNGAI PINANG	2024	0,6971	0,6	0,8667	0,7213	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072003	DUKU	2024	0,8114	0,7333	0,8	0,7816	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072004	BATU HAMPA	2024	0,8057	0,7333	0,8	0,7797	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072005	NANGGALO	2024	0,7714	0,9333	0,8	0,8349	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072006	AMPANG PULAI	2024	0,8171	0,7167	0,9333	0,8224	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072007	KAPUH	2024	0,8171	0,7333	0,8	0,7835	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072008	BARUNG-BARUNG BALANTAI	2024	0,8914	0,9	0,8	0,8638	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072009	BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN	2024	0,7829	0,75	0,7333	0,7554	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072010	MANDEH	2024	0,8229	0,7667	0,5333	0,7076	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072011	KAPUAH UTARA	2024	0,8171	0,8	0,6	0,739	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072012	TARATAK SUNGAI LUNDANG	2024	0,7486	0,5833	0,8667	0,7329	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072013	SIGUNTUR TUA	2024	0,8	0,6833	0,6667	0,7167	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072014	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	2024	0,7943	0,6667	0,7333	0,7314	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072015	DUKU UTARA	2024	0,76	0,6833	0,5333	0,6589	BERKEMBANG
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072016	PULAU KARAM AMPANG PULAI	2024	0,8229	0,7167	0,8	0,7798	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072017	JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PUL	2024	0,8286	0,75	0,9333	0,8373	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072018	CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	2024	0,7714	0,7	0,6667	0,7127	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072019	SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	2024	0,7371	0,65	0,8	0,729	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072020	BATU HAMPAR SELATAN	2024	0,8571	0,8333	0,8	0,8302	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072021	BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	2024	0,8114	0,75	0,5333	0,6983	BERKEMBANG
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072022	BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	2024	0,7714	0,6333	0,7333	0,7127	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072023	SETARA NANGGALO	2024	0,84	0,6333	0,6	0,6911	BERKEMBANG
130108	SUTERA	1301082001	TARATAK	2024	0,8343	0,65	0,8	0,7614	MAJU
130108	SUTERA	1301082002	SURANTIH	2024	0,84	0,9	0,7333	0,8244	MANDIRI
130108	SUTERA	1301082003	AMPING PARAK	2024	0,8	0,85	1	0,8833	MANDIRI
130108	SUTERA	1301082004	AMPING PARAK TIMUR	2024	0,84	0,6667	0,8	0,7689	MAJU
130108	SUTERA	1301082005	KOTO TARATAK	2024	0,8171	0,6667	0,8667	0,7835	MAJU
130108	SUTERA	1301082006	LANSANO TARATAK	2024	0,7771	0,7167	0,9333	0,809	MAJU
130108	SUTERA	1301082007	AUR DURI SURANTIH	2024	0,8229	0,75	0,6667	0,7465	MAJU
130108	SUTERA	1301082008	RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH	2024	0,7314	0,6	0,8	0,7105	MAJU
130108	SUTERA	1301082009	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	2024	0,8	0,5667	0,8	0,7222	MAJU
130108	SUTERA	1301082010	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	2024	0,8171	0,65	0,6667	0,7113	MAJU
130108	SUTERA	1301082011	GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH	2024	0,7257	0,55	0,8	0,6919	BERKEMBANG
130108	SUTERA	1301082012	GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH	2024	0,6286	0,6	0,6667	0,6317	BERKEMBANG
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092001	PUNGGASAN	2024	0,9086	0,8167	0,8667	0,864	MANDIRI
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092002	AIR HAJI	2024	0,8857	0,8167	1	0,9008	MANDIRI
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092003	PUNGGASAN UTARA	2024	0,7886	0,7167	0,8	0,7684	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092004	PUNGGASAN TIMUR	2024	0,8171	0,6	0,5333	0,6502	BERKEMBANG
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092005	PADANG XI PUNGGASAN	2024	0,7829	0,6667	0,8	0,7498	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092006	LAGAN MUDIK PUNGGASAN	2024	0,8286	0,6667	0,9333	0,8095	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092007	LAGAN HILIR PUNGGASAN	2024	0,7714	0,7833	0,6667	0,7405	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092008	AIR HAJI TENGGARA	2024	0,7486	0,6333	0,8	0,7273	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092009	PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	2024	0,8	0,7667	0,6	0,7222	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092010	PASAR BUKIT AIR HAJI	2024	0,84	0,5833	0,8	0,7411	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092011	AIR HAJI BARAT	2024	0,8857	0,7	0,8667	0,8175	MANDIRI
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092012	AIR HAJI TENGAH	2024	0,7771	0,6167	0,7333	0,709	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092013	RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	2024	0,8171	0,7333	0,8	0,7835	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092014	MUARA GADANG AIR HAJI	2024	0,6857	0,5833	0,8667	0,7119	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092015	SUNGAI SIRAH AIR HAJI	2024	0,8057	0,5167	0,8	0,7075	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092016	MUARA KANDIS PUNGGASAN	2024	0,7257	0,7667	0,8	0,7641	MAJU
130110	LUNANG	1301102001	LUNANG	2024	0,9086	0,8667	0,8667	0,8806	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102003	LUNANG UTARA	2024	0,7257	0,8667	0,8	0,7975	MAJU
130110	LUNANG	1301102004	LUNANG SELATAN	2024	0,9429	0,8833	0,7333	0,8532	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102005	LUNANG BARAT	2024	0,8857	0,7167	0,8667	0,823	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102015	SINDANG LUNANG	2024	0,84	0,75	0,8667	0,8189	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102016	PONDOK PARIAN LUNANG	2024	0,8743	0,75	0,8667	0,8303	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102017	LUNANG TENGAH	2024	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102018	LUNANG SATU	2024	0,8914	0,9	0,6667	0,8194	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102019	LUNANG DUA	2024	0,8571	0,7833	0,9333	0,8579	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102020	LUNANG TIGA	2024	0,8629	0,8167	0,8667	0,8487	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112001	TAPAN	2024	0,7829	0,6667	0,8667	0,7721	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112002	PASAR TAPAN	2024	0,9486	0,85	0,9333	0,9106	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112007	BATANG ARAH TAPAN	2024	0,8743	0,7333	0,8	0,8025	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112008	AMPANG TULAK TAPAN	2024	0,8114	0,65	0,9333	0,7983	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112009	TANJUNG PONDOK TAPAN	2024	0,8114	0,7167	0,7333	0,7538	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112010	BATANG BETUNG TAPAN	2024	0,8857	0,8833	0,6667	0,8119	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112016	BUKIT BUAI TAPAN	2024	0,8629	0,5333	0,9333	0,7765	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112017	RIAK DANAU TAPAN	2024	0,8686	0,9667	0,8	0,8784	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112018	KOTO ANAU TAPAN	2024	0,8743	0,65	1	0,8414	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112019	DUSUN BARU TAPAN	2024	0,7829	0,7167	0,6667	0,7221	MAJU
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122001	PULUIK-PULUIK	2024	0,84	0,8	0,9333	0,8578	MANDIRI
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122002	KOTO RANAH	2024	0,7771	0,7333	0,8667	0,7924	MAJU
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122003	MUARO AIE	2024	0,6686	0,6667	0,8667	0,734	MAJU
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122004	PANCUANG TABA	2024	0,7371	0,5833	0,8	0,7068	BERKEMBANG

130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122005	PULUIK-PULUIK SELATAN	2024	0,8114	0,7167	0,9333	0,8205	MANDIRI
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122006	LIMAU GADANG PANCUNG TABA	2024	0,7143	0,4667	0,8667	0,6825	BERKEMBANG
130113	AIRPURA	1301132001	INDERAPURA UTARA	2024	0,8971	0,6167	0,9333	0,8157	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132002	MUARA INDERAPURA	2024	0,84	0,7833	0,9333	0,8522	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132003	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	2024	0,88	0,85	0,6667	0,7989	MAJU
130113	AIRPURA	1301132004	LALANG PANJANG INDERAPURA	2024	0,9029	0,8167	1	0,9065	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132005	PALOKAN INDERAPURA	2024	0,9086	0,7	0,8	0,8029	MAJU
130113	AIRPURA	1301132006	LUBUK BETUNG INDERAPURA	2024	0,7657	0,55	0,9333	0,7497	MAJU
130113	AIRPURA	1301132007	TLUK KUALO INDERAPURA	2024	0,7943	0,6667	0,8667	0,7759	MAJU
130113	AIRPURA	1301132008	TANAH BAKALI INDERAPURA	2024	0,92	0,7	0,9333	0,8511	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132009	INDERAPURA TIMUR	2024	0,7486	0,7167	1	0,8217	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132010	PULAU RAJO INDERAPURA	2024	0,6971	0,6167	0,9333	0,749	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142001	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	2024	0,7029	0,6167	0,8	0,7065	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142002	LIMAU PURUT TAPAN	2024	0,7771	0,5667	0,6667	0,6702	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142003	TALANG BALARIK TAPAN	2024	0,6971	0,6	0,8667	0,7213	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142004	TEBING TINGGI TAPAN	2024	0,8971	0,9	0,6	0,799	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142005	BINJAI TAPAN	2024	0,7771	0,6	0,6667	0,6813	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142006	SUNGAI PINANG TAPAN	2024	0,7771	0,6667	0,6667	0,7035	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142007	TALANG KOTO PULAI TAPAN	2024	0,84	0,5333	0,6	0,6578	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142008	KAMPUNG TENGAH TAPAN	2024	0,9371	0,7833	0,6	0,7735	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142009	KUBU TAPAN	2024	0,8686	0,75	0,6667	0,7617	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142010	SIMPANG GUNUNG TAPAN	2024	0,7486	0,6833	0,6667	0,6995	BERKEMBANG
130115	SILAUT	1301152001	SILAUT	2024	0,8457	0,6667	0,8667	0,793	MAJU
130115	SILAUT	1301152002	SUNGAI SIRAH	2024	0,8	0,8833	0,8667	0,85	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152003	SUNGAI SARIK	2024	0,8114	0,7	0,9333	0,8149	MAJU
130115	SILAUT	1301152004	SUNGAI PULAI	2024	0,9486	0,65	0,8	0,7995	MAJU
130115	SILAUT	1301152005	PASIR BINJAI	2024	0,7943	0,75	0,9333	0,8259	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152006	TALANG BINJAI	2024	0,8057	0,5833	0,8667	0,7519	MAJU
130115	SILAUT	1301152007	DURIAN SERIBU	2024	0,8229	0,5667	0,9333	0,7743	MAJU
130115	SILAUT	1301152008	LUBUK BUNTA	2024	0,8343	0,8667	0,8667	0,8559	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152009	AIR HITAM	2024	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152010	SAMBUNGO	2024	0,7714	0,6667	0,7333	0,7238	MAJU

Catatan :

Mandiri :	**56**
Maju :	**95**
Berkembang :	**31**
Tertinggal :	**0**
Sangat Tertinggal :	**0**
	182

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA IDM 2024 UNTUK PENDANAAN 2025 SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN

KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
130101	PANCUNG SOAL	1301012005	KUDO-KUDO INDERAPURA	2024	0,8457	0,9333	0,9333	0,9041	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012006	INDERAPURA SELATAN	2024	0,8629	0,7667	0,8667	0,8321	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012009	SIMPANG LAMA INDERAPURA	2024	0,88	0,8667	0,7333	0,8267	MANDIRI
130101	PANCUNG SOAL	1301012010	TIGO SUNGAI INDERAPURA	2024	0,9029	0,7833	0,8667	0,851	MANDIRI
130102	RANAH PESISIR	1301022001	PELANGAI	2024	0,7486	0,9833	1	0,9106	MANDIRI
130102	RANAH PESISIR	1301022007	KOTO VIII PELANGAI	2024	0,8971	0,6833	0,8667	0,8157	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032001	KAMBANG	2024	0,8686	0,8333	0,9333	0,8784	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032002	LAKITAN	2024	0,8057	0,8667	0,9333	0,8686	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032005	KAMBANG BARAT	2024	0,8457	0,8167	0,8667	0,843	MANDIRI
130103	LENGAYANG	1301032006	LAKITAN UTARA	2024	0,8971	0,8333	0,8667	0,8657	MANDIRI
130104	BATANG KAPAS	1301042001	IV KOTO HILIE	2024	0,8286	0,85	0,8	0,8262	MANDIRI
130104	BATANG KAPAS	1301042004	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	2024	0,8629	0,6667	1	0,8432	MANDIRI
130104	BATANG KAPAS	1301042008	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	2024	0,8	0,7167	0,9333	0,8167	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052001	PAINAN	2024	0,9086	0,8667	1	0,9251	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052003	SALIDO	2024	0,9829	0,7833	0,9333	0,8998	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052004	LUMPO	2024	0,84	0,8	0,8667	0,8356	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052005	BUNGA PASANG SALIDO	2024	0,8571	0,7	1	0,8524	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052006	SAGO SALIDO	2024	0,96	0,85	0,9333	0,9144	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052012	AMPUAN LUMPO	2024	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052019	PAINAN SELATAN PAINAN	2024	0,9486	0,8667	0,9333	0,9162	MANDIRI
130105	IV JURAI	1301052020	PAINAN TIMUR PAINAN	2024	0,8914	0,8	1	0,8971	MANDIRI
130106	BAYANG	1301062005	KOTO BERAPAK	2024	0,8229	0,8667	0,8	0,8298	MANDIRI
130106	BAYANG	1301062007	PASAR BARU	2024	0,92	0,95	0,8	0,89	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072005	NANGGALO	2024	0,7714	0,9333	0,8	0,8349	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072006	AMPANG PULAI	2024	0,8171	0,7167	0,9333	0,8224	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072008	BARUNG-BARUNG BALANTAI	2024	0,8914	0,9	0,8	0,8638	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072017	JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI	2024	0,8286	0,75	0,9333	0,8373	MANDIRI
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072020	BATU HAMPAR SELATAN	2024	0,8571	0,8333	0,8	0,8302	MANDIRI
130108	SUTERA	1301082002	SURANTIH	2024	0,84	0,9	0,7333	0,8244	MANDIRI
130108	SUTERA	1301082003	AMPING PARAK	2024	0,8	0,85	1	0,8833	MANDIRI
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092001	PUNGGASAN	2024	0,9086	0,8167	0,8667	0,864	MANDIRI
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092002	AIR HAJI	2024	0,8857	0,8167	1	0,9008	MANDIRI
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092011	AIR HAJI BARAT	2024	0,8857	0,7	0,8667	0,8175	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102001	LUNANG	2024	0,9086	0,8667	0,8667	0,8806	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102004	LUNANG SELATAN	2024	0,9429	0,8833	0,7333	0,8532	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102005	LUNANG BARAT	2024	0,8857	0,7167	0,8667	0,823	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102015	SINDANG LUNANG	2024	0,84	0,75	0,8667	0,8189	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102016	PONDOK PARIAN LUNANG	2024	0,8743	0,75	0,8667	0,8303	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102017	LUNANG TENGAH	2024	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102018	LUNANG SATU	2024	0,8914	0,9	0,6667	0,8194	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102019	LUNANG DUA	2024	0,8571	0,7833	0,9333	0,8579	MANDIRI
130110	LUNANG	1301102020	LUNANG TIGA	2024	0,8629	0,8167	0,8667	0,8487	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112002	PASAR TAPAN	2024	0,9486	0,85	0,9333	0,9106	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112017	RIAK DANAU TAPAN	2024	0,8686	0,9667	0,8	0,8784	MANDIRI
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112018	KOTO ANAU TAPAN	2024	0,8743	0,65	1	0,8414	MANDIRI
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122001	PULUIK-PULUIK	2024	0,84	0,8	0,9333	0,8578	MANDIRI
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122005	PULUIK-PULUIK SELATAN	2024	0,8114	0,7167	0,9333	0,8205	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132001	INDERAPURA UTARA	2024	0,8971	0,6167	0,9333	0,8157	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132002	MUARA INDERAPURA	2024	0,84	0,7833	0,9333	0,8522	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132004	LALANG PANJANG INDERAPURA	2024	0,9029	0,8167	1	0,9065	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132008	TANAH BAKALI INDERAPURA	2024	0,92	0,7	0,9333	0,8511	MANDIRI
130113	AIRPURA	1301132009	INDERAPURA TIMUR	2024	0,7486	0,7167	1	0,8217	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152002	SUNGAI SIRAH	2024	0,8	0,8833	0,8667	0,85	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152005	PASIR BINJAI	2024	0,7943	0,75	0,9333	0,8259	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152008	LUBUK BUNTA	2024	0,8343	0,8667	0,8667	0,8559	MANDIRI
130115	SILAUT	1301152009	AIR HITAM	2024	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA IDM 2024 UNTUK PENDANAAN 2025 SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN

KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
130101	PANCUNG SOAL	1301012001	INDERAPURA	2024	0,8457	0,75	0,6667	0,7541	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012002	MUARO SAKAI INDERAPURA	2024	0,8457	0,7833	0,8	0,8097	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012003	TIGA SEPAKAT INDERAPURA	2024	0,7486	0,6667	1	0,8051	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012004	INDERAPURA BARAT	2024	0,84	0,6333	0,9333	0,8022	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012011	TLUK AMPLU INDERAPURA	2024	0,8286	0,7333	0,8667	0,8095	MAJU
130101	PANCUNG SOAL	1301012012	INDERAPURA TENGAH	2024	0,88	0,7	0,8	0,7933	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022002	SUNGAI TUNU	2024	0,6971	0,7	0,7333	0,7102	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022003	SUNGAI TUNU UTARA	2024	0,8057	0,8	0,5333	0,713	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022004	SUNGAI TUNU BARAT	2024	0,6857	0,6	0,8667	0,7175	MAJU
130102	RANAH PESISIR	1301022010	PASIA PELANGAI	2024	0,7486	0,7833	0,6667	0,7329	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032003	KAMBANG UTARA	2024	0,7257	0,7333	0,7333	0,7308	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032004	KAMBANG TIMUR	2024	0,8114	0,8	0,8	0,8038	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032007	LAKITAN SELATAN	2024	0,7771	0,7833	0,8	0,7868	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032008	LAKITAN TIMUR	2024	0,7943	0,7667	0,8	0,787	MAJU
130103	LENGAYANG	1301032009	LAKITAN TENGAH	2024	0,72	0,65	0,8667	0,7456	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042002	IV KOTO MUDIEK	2024	0,8171	0,5333	0,8	0,7168	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042003	TALUAK	2024	0,8114	0,7167	0,8667	0,7983	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042006	TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	2024	0,7486	0,5833	0,8	0,7106	MAJU
130104	BATANG KAPAS	1301042009	TALUK TIGO SAKATO	2024	0,7029	0,6167	0,8667	0,7287	MAJU
130105	IV JURAI	1301052002	TAMBANG	2024	0,8686	0,6333	0,8	0,7673	MAJU
130105	IV JURAI	1301052007	SALIDO SARI BULAN	2024	0,8343	0,7	0,8667	0,8003	MAJU
130105	IV JURAI	1301052008	KOTO RAWANG	2024	0,84	0,6167	0,8667	0,7744	MAJU
130105	IV JURAI	1301052009	LIMAU GADANG LUMPO	2024	0,7657	0,6167	0,8	0,7275	MAJU
130105	IV JURAI	1301052010	BATU KUNIK LUMPO	2024	0,8171	0,6	0,8667	0,7613	MAJU
130105	IV JURAI	1301052011	TARATAK TANGAH LUMPO	2024	0,7657	0,7167	0,8	0,7608	MAJU
130105	IV JURAI	1301052013	AMPANG TAREH LUMPO	2024	0,9143	0,55	0,9333	0,7992	MAJU
130105	IV JURAI	1301052014	BALAI SINAYAN LUMPO	2024	0,7657	0,5	0,9333	0,733	MAJU
130105	IV JURAI	1301052015	SUNGAI GAYO LUMPO	2024	0,7486	0,6333	0,8	0,7273	MAJU
130105	IV JURAI	1301052016	SUNGAI SARIAK LUMPO	2024	0,8114	0,6	0,8667	0,7594	MAJU
130105	IV JURAI	1301052017	BUKIK KACIAK LUMPO	2024	0,8171	0,6	0,8	0,739	MAJU
130105	IV JURAI	1301052018	GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	2024	0,7714	0,6167	0,9333	0,7738	MAJU
130106	BAYANG	1301062006	TALAOK	2024	0,7714	0,7667	0,8	0,7794	MAJU
130106	BAYANG	1301062009	API-API PASAR BARU	2024	0,7943	0,5667	0,8667	0,7425	MAJU
130106	BAYANG	1301062012	SAWAH LAWEH PASAR BARU	2024	0,8114	0,5667	0,8667	0,7483	MAJU
130106	BAYANG	1301062019	GURUN PANJANG UTARA	2024	0,7486	0,6333	0,8	0,7273	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072001	SIGUNTUR	2024	0,8743	0,65	0,6	0,7081	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072002	SUNGAI PINANG	2024	0,6971	0,6	0,8667	0,7213	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072003	DUKU	2024	0,8114	0,7333	0,8	0,7816	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072004	BATU HAMPA	2024	0,8057	0,7333	0,8	0,7797	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072007	KAPUH	2024	0,8171	0,7333	0,8	0,7835	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072009	BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN	2024	0,7829	0,75	0,7333	0,7554	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072010	MANDEH	2024	0,8229	0,7667	0,5333	0,7076	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072011	KAPUAH UTARA	2024	0,8171	0,8	0,6	0,739	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072012	TARATAK SUNGAI LUNDANG	2024	0,7486	0,5833	0,8667	0,7329	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072013	SIGUNTUR TUA	2024	0,8	0,6833	0,6667	0,7167	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072014	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	2024	0,7943	0,6667	0,7333	0,7314	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072016	PULAU KARAM AMPANG PULAI	2024	0,8229	0,7167	0,8	0,7798	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072018	CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	2024	0,7714	0,7	0,6667	0,7127	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072019	SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	2024	0,7371	0,65	0,8	0,729	MAJU
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072022	BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	2024	0,7714	0,6333	0,7333	0,7127	MAJU
130108	SUTERA	1301082001	TARATAK	2024	0,8343	0,65	0,8	0,7614	MAJU
130108	SUTERA	1301082004	AMPING PARAK TIMUR	2024	0,84	0,6667	0,8	0,7689	MAJU
130108	SUTERA	1301082005	KOTO TARATAK	2024	0,8171	0,6667	0,8667	0,7835	MAJU
130108	SUTERA	1301082006	LANSANO TARATAK	2024	0,7771	0,7167	0,9333	0,809	MAJU
130108	SUTERA	1301082007	AUR DURI SURANTIH	2024	0,8229	0,75	0,6667	0,7465	MAJU
130108	SUTERA	1301082008	RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH	2024	0,7314	0,6	0,8	0,7105	MAJU
130108	SUTERA	1301082009	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	2024	0,8	0,5667	0,8	0,7222	MAJU
130108	SUTERA	1301082010	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	2024	0,8171	0,65	0,6667	0,7113	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092003	PUNGGASAN UTARA	2024	0,7886	0,7167	0,8	0,7684	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092005	PADANG XI PUNGGASAN	2024	0,7829	0,6667	0,8	0,7498	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092006	LAGAN MUDIK PUNGGASAN	2024	0,8286	0,6667	0,9333	0,8095	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092007	LAGAN HILIR PUNGGASAN	2024	0,7714	0,7833	0,6667	0,7405	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092008	AIR HAJI TENGGARA	2024	0,7486	0,6333	0,8	0,7273	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092009	PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	2024	0,8	0,7667	0,6	0,7222	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092010	PASAR BUKIT AIR HAJI	2024	0,84	0,5833	0,8	0,7411	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092012	AIR HAJI TENGAH	2024	0,7771	0,6167	0,7333	0,709	MAJU

130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092013	RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	2024	0,8171	0,7333	0,8	0,7835	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092014	MUARA GADANG AIR HAJI	2024	0,6857	0,5833	0,8667	0,7119	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092015	SUNGAI SIRAH AIR HAJI	2024	0,8057	0,5167	0,8	0,7075	MAJU
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092016	MUARA KANDIS PUNGGASAN	2024	0,7257	0,7667	0,8	0,7641	MAJU
130110	LUNANG	1301102003	LUNANG UTARA	2024	0,7257	0,8667	0,8	0,7975	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112001	TAPAN	2024	0,7829	0,6667	0,8667	0,7721	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112007	BATANG ARAH TAPAN	2024	0,8743	0,7333	0,8	0,8025	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112008	AMPANG TULAK TAPAN	2024	0,8114	0,65	0,9333	0,7983	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112009	TANJUNG PONDOK TAPAN	2024	0,8114	0,7167	0,7333	0,7538	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112010	BATANG BETUNG TAPAN	2024	0,8857	0,8833	0,6667	0,8119	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112016	BUKIT BUAI TAPAN	2024	0,8629	0,5333	0,9333	0,7765	MAJU
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1301112019	DUSUN BARU TAPAN	2024	0,7829	0,7167	0,6667	0,7221	MAJU
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122002	KOTO RANAH	2024	0,7771	0,7333	0,8667	0,7924	MAJU
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122003	MUARO AIE	2024	0,6686	0,6667	0,8667	0,734	MAJU
130113	AIRPURA	1301132003	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	2024	0,88	0,85	0,6667	0,7989	MAJU
130113	AIRPURA	1301132005	PALOKAN INDERAPURA	2024	0,9086	0,7	0,8	0,8029	MAJU
130113	AIRPURA	1301132006	LUBUK BETUNG INDERAPURA	2024	0,7657	0,55	0,9333	0,7497	MAJU
130113	AIRPURA	1301132007	TLUK KUALO INDERAPURA	2024	0,7943	0,6667	0,8667	0,7759	MAJU
130113	AIRPURA	1301132010	PULAU RAJO INDERAPURA	2024	0,6971	0,6167	0,9333	0,749	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142003	TALANG BALARIK TAPAN	2024	0,6971	0,6	0,8667	0,7213	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142004	TEBING TINGGI TAPAN	2024	0,8971	0,9	0,6	0,799	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142008	KAMPUNG TENGAH TAPAN	2024	0,9371	0,7833	0,6	0,7735	MAJU
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142009	KUBU TAPAN	2024	0,8686	0,75	0,6667	0,7617	MAJU
130115	SILAUT	1301152001	SILAUT	2024	0,8457	0,6667	0,8667	0,793	MAJU
130115	SILAUT	1301152003	SUNGAI SARIK	2024	0,8114	0,7	0,9333	0,8149	MAJU
130115	SILAUT	1301152004	SUNGAI PULAI	2024	0,9486	0,65	0,8	0,7995	MAJU
130115	SILAUT	1301152006	TALANG BINJAI	2024	0,8057	0,5833	0,8667	0,7519	MAJU
130115	SILAUT	1301152007	DURIAN SERIBU	2024	0,8229	0,5667	0,9333	0,7743	MAJU
130115	SILAUT	1301152010	SAMBUNGO	2024	0,7714	0,6667	0,7333	0,7238	MAJU

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA IDM 2024 UNTUK PENDANAAN 2025 SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN

KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
130102	RANAH PESISIR	1301022005	NYIUR MELAMBAI PELANGAI	2024	0,6286	0,5167	0,9333	0,6929	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022006	SUNGAI LIKU PELANGAI	2024	0,6571	0,7333	0,6667	0,6857	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022008	PELANGAI GADANG	2024	0,6743	0,55	0,8667	0,697	BERKEMBANG
130102	RANAH PESISIR	1301022009	PELANGAI KACIAK	2024	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG
130104	BATANG KAPAS	1301042005	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	2024	0,8171	0,6833	0,6	0,7002	BERKEMBANG
130104	BATANG KAPAS	1301042007	TUIK IV KOTO MUDIEK	2024	0,7943	0,5833	0,6	0,6592	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062008	GURUN PANJANG	2024	0,8286	0,6	0,6	0,6762	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062010	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	2024	0,8514	0,6667	0,6	0,706	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062011	ASAM KAMBA PASAR BARU	2024	0,7371	0,5333	0,6	0,6235	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062013	KAPEH PANJI JAYA TALAOK	2024	0,8057	0,6667	0,6	0,6908	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062014	AUR BEGALUNG TALAOK	2024	0,84	0,65	0,6	0,6967	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062015	KAPELGAM KOTO BERAPAK	2024	0,8286	0,65	0,6	0,6929	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062016	KOTO BARU KOTO BERAPAK	2024	0,7029	0,6	0,8	0,701	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062017	KUBANG KOTO BERAPAK	2024	0,76	0,6333	0,6	0,6644	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062018	KAPUJAN KOTO BERAPAK	2024	0,72	0,5667	0,8	0,6956	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062020	GURUN PANJANG BARAT	2024	0,7714	0,5667	0,6	0,646	BERKEMBANG
130106	BAYANG	1301062021	GURUN PANJANG SELATAN	2024	0,7486	0,6833	0,6667	0,6995	BERKEMBANG
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072015	DUKU UTARA	2024	0,76	0,6833	0,5333	0,6589	BERKEMBANG
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072021	BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	2024	0,8114	0,75	0,5333	0,6983	BERKEMBANG
130107	KOTO XI TARUSAN	1301072023	SETARA NANGGALO	2024	0,84	0,6333	0,6	0,6911	BERKEMBANG
130108	SUTERA	1301082011	GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH	2024	0,7257	0,55	0,8	0,6919	BERKEMBANG
130108	SUTERA	1301082012	GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH	2024	0,6286	0,6	0,6667	0,6317	BERKEMBANG
130109	LINGGO SARI BAGANTI	1301092004	PUNGGASAN TIMUR	2024	0,8171	0,6	0,5333	0,6502	BERKEMBANG
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122004	PANCUANG TABA	2024	0,7371	0,5833	0,8	0,7068	BERKEMBANG
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	1301122006	LIMAU GADANG PANCUNG TABA	2024	0,7143	0,4667	0,8667	0,6825	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142001	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	2024	0,7029	0,6167	0,8	0,7065	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142002	LIMAU PURUT TAPAN	2024	0,7771	0,5667	0,6667	0,6702	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142005	BINJAI TAPAN	2024	0,7771	0,6	0,6667	0,6813	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142006	SUNGAI PINANG TAPAN	2024	0,7771	0,6667	0,6667	0,7035	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142007	TALANG KOTO PULAI TAPAN	2024	0,84	0,5333	0,6	0,6578	BERKEMBANG
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1301142010	SIMPANG GUNUNG TAPAN	2024	0,7486	0,6833	0,6667	0,6995	BERKEMBANG

Nomor : B-5935/LP.01/J.5/2024 23 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Hasil Indikator Kinerja Utama Pemutakhiran PK24

Kepada Yth.
Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota
se-Sumatera Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sebagaimana amanat Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 49 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah **wajib** mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan, salah satunya melalui **pendataan keluarga.**

Selanjutnya, hasil Pemutakhiran PK-24 digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagai bahan evaluasi serta perumusan kebijakan dan strategi Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yaitu:

1) Prevalensi kontrasepsi modern/mCPR **(56,3 persen)**;
2) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak dipenuhi/*unmeetneed* **(15,5 persen);**
3) Median Usia Kawin Pertama/mUKP wanita **(22,4 tahun);**
4) Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/PA MKJP **(32,1 persen);**
5) Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/DCR 12 bulan **(21,5 persen);**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1, Padang 25135
T: (+62751) 7052357 | F: (+62751) 7055057
sumbar.bkkbn.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6) Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga **(61,2 persen)**;
7) Persentase Masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana **(81.0 persen).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

${ttd}

Fatmawati, ST, M.Eng
NIP. 19711208 199103 2 001

Kepada Yth.

1. Deputi Bidang ADPIN BKKBN
2. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran:

ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (mCPR)

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-24

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Target 2024	mCPR 2024	CPR 2024	Metode Kontrasepsi								
						MOW/ steril wanita	MOP/ steril pria	IUD/ spiral/ AKDR	implant	suntik	pil	kondom	MAL	tradisional
1	SUMATERA BARAT	AGAM	47.16	43.4	48.1	4.6	0.2	5.8	4.8	18.9	3.6	3.8	1.9	4.6
2	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	64.70	64.2	64.8	3.3	0.1	2.7	13.0	35.3	6.3	2.7	0.8	0.5
3	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	40.00	51.6	52.6	0.1	0.0	2.2	23.8	21.8	0.8	2.0	0.9	0.9
4	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	54.40	64.4	66.1	3.6	0.2	17.7	4.6	14.7	4.2	17.9	1.4	1.7
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	56.40	55.6	56.3	5.1	0.1	9.8	4.6	25.4	5.0	4.8	0.9	0.7
6	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	49.86	62.0	62.6	5.1	0.1	27.9	1.4	6.2	2.2	17.6	1.4	0.7
7	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	48.80	46.8	57.2	6.7	0.3	7.0	3.8	17.1	1.9	7.8	2.2	10.4
8	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	51.98	63.6	63.9	4.0	0.4	11.4	5.6	22.2	4.3	13.9	1.7	0.3
9	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	63.40	63.2	63.3	7.1	0.3	8.1	7.3	23.7	8.0	7.2	1.5	0.1
10	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	71.90	69.0	69.3	7.7	0.1	16.7	9.8	18.4	5.9	9.0	1.3	0.3
11	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	57.52	60.6	61.2	2.4	0.0	5.4	6.3	34.3	6.8	3.5	1.8	0.6
12	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	38.30	42.3	42.6	3.3	0.1	1.7	8.2	22.7	3.2	0.6	2.5	0.3
13	SUMATERA BARAT	PASAMAN	53.00	56.5	57.8	3.5	0.1	3.4	7.0	30.1	6.7	4.4	1.3	1.3
14	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	50.70	52.8	55.8	2.9	0.0	2.1	6.4	34.6	3.0	2.2	1.6	2.9
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	50.40	56.8	56.9	1.7	0.1	4.2	9.1	34.8	4.8	1.0	1.1	0.0
16	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	68.20	62.6	62.7	4.8	0.1	2.6	11.5	32.6	6.4	2.9	1.6	0.1
17	SUMATERA BARAT	SOLOK	61.40	59.5	59.9	4.4	0.1	6.3	11.8	29.9	4.0	1.4	1.6	0.4
18	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	57.70	67.6	67.8	1.6	0.2	1.5	14.4	41.3	4.9	2.8	0.9	0.3
19	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	60.10	60.4	61.2	6.3	0.2	8.5	8.8	27.1	4.1	3.5	1.8	0.9

*Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24; *Kabupaten/kota dengan RSE >= 25% jadi perlu kehati-hatian dalam penggunaan angka capaian indikator ;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-24

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Target 2024	*Unmet need* KB 2024	Kategori				
					using for limiting	*using for spacing*	*met need*	*unmet need for limiting*	*unmet need for spacing*
1	SUMATERA BARAT	AGAM	23.3	26.2	29.3	18.7	24.3	17.2	9.0
2	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	13.5	13.2	33.4	31.4	20.9	9.0	4.3
3	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	31.2	13.0	32.8	19.7	33.9	9.3	3.6
4	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	14.7	12.1	41.9	24.2	20.3	8.8	3.3
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	14.9	13.6	32.4	24.0	29.0	9.1	4.6
6	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	23.0	14.0	37.1	25.5	21.8	9.3	4.7
7	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN*	15.0						
8	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	18.6	11.4	40.0	23.8	23.2	8.0	3.4
9	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	15.1	13.8	39.4	23.9	21.5	9.4	4.5
10	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	9.8	5.7	41.1	28.3	23.3	3.8	1.9
11	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	18.2	14.0	37.7	23.5	23.3	10.1	4.0
12	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	27.3	23.9	17.8	24.8	32.1	13.0	10.9
13	SUMATERA BARAT	PASAMAN	18.8	17.1	28.2	29.6	23.9	11.1	6.0
14	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	19.3	16.6	23.4	32.3	26.4	9.0	7.6
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	12.6	10.9	26.7	30.1	31.1	6.7	4.0
16	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	11.0	14.4	33.7	29.0	21.5	8.3	6.0
17	SUMATERA BARAT	SOLOK	14.7	16.4	28.4	31.6	22.3	9.1	7.2
18	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	15.0	10.0	29.2	38.6	21.0	5.5	4.6
19	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	14.1	15.2	37.4	23.9	22.1	10.4	4.7

*Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24; *Kabupaten/kota dengan RSE >= 25% jadi perlu kehati-hatian dalam penggunaan angka capaian indikator ;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-24

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Target 2024	mUKP 2024
1	SUMATERA BARAT	AGAM	23.20	23.0
2	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	20.90	20.9
3	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	20.80	20.9
4	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	24.40	23.2
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	24.40	23.0
6	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	24.40	23.1
7	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	25.00	23.1
8	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	23.41	23.1
9	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	22.80	22.5
10	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	23.22	22.8
11	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	21.62	22.2
12	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	23.00	22.5
13	SUMATERA BARAT	PASAMAN	21.70	21.0
14	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	21.10	21.6
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	21.30	22.0
16	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	20.20	20.9
17	SUMATERA BARAT	SOLOK	21.40	21.4
18	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	21.10	20.9
19	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	23.00	22.9

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF (PA) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-24

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Target 2024	PA MKJP 2024
1	SUMATERA BARAT	AGAM	30.1	35.3
2	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	14.7	29.8
3	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	37.0	50.7
4	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	43.0	40.6
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	35.2	35.2
6	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	64.0	55.8
7	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	32.3	37.9
8	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	38.3	33.7
9	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	40.2	36.1
10	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	50.0	49.8
11	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	31.3	23.4
12	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	25.9	31.4
13	SUMATERA BARAT	PASAMAN	26.6	24.8
14	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	24.8	21.7
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	23.6	26.5
16	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	26.0	30.5
17	SUMATERA BARAT	SOLOK	36.4	38.0
18	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	23.4	26.1
19	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	36.7	39.5

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-24

No	Provinsi	Kabupaten/kota	iBangga 2024	Dimensi		
				Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
1	SUMATERA BARAT	AGAM	59.36	62.06	51.86	64.16
2	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	61.40	59.08	55.14	69.97
3	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	55.60	57.22	43.96	65.63
4	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	64.67	63.86	57.44	72.71
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	64.62	65.44	54.10	74.32
6	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	66.46	67.34	57.11	74.93
7	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	64.86	66.06	56.31	72.23
8	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	65.61	65.45	58.48	72.90
9	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	63.88	66.29	55.48	69.88
10	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	65.90	66.73	57.59	73.40
11	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	59.50	58.76	50.51	69.21
12	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	56.32	56.33	49.93	62.71
13	SUMATERA BARAT	PASAMAN	62.58	63.83	51.47	72.43
14	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	60.28	59.46	52.32	69.05
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	59.49	59.08	49.18	70.23
16	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	60.64	58.78	54.04	69.08
17	SUMATERA BARAT	SOLOK	60.15	59.39	50.85	70.23
18	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	60.59	61.39	49.67	70.70
19	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	62.42	61.59	54.70	70.98

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERSENTASE MASYARAKAT (KELUARGA) YANG TERJANGKAU PROGRAM BANGGA KENCANA

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-24

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Informasi Bangga Kencana 2024	Sumber	
				Media	Petugas
1	SUMATERA BARAT	AGAM	70.6	72.1	69.0
2	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	82.4	81.3	83.5
3	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	78.9	72.0	85.7
4	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	89.0	89.2	88.8
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	90.8	90.8	90.7
6	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	95.0	96.0	94.0
7	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	87.8	89.6	86.0
8	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	89.0	89.2	88.8
9	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	84.6	84.6	84.6
10	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	90.2	90.7	89.6
11	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	79.5	79.1	79.9
12	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	74.1	71.4	76.8
13	SUMATERA BARAT	PASAMAN	83.1	79.8	86.4
14	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	73.7	71.6	75.8
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	75.0	74.7	75.2
16	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	77.6	74.3	80.9
17	SUMATERA BARAT	SOLOK	78.6	77.3	79.8
18	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	77.3	75.0	79.5
19	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	88.7	88.0	89.3

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TABEL 1

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KETENTRAMAN																						KELUARGA MENGALAMI CERAI HIDUP	
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA (USIA 10 TAHUN KE ATAS) MENJALANKAN IBADAH SECARA RUTIN SESUAI DENGAN TUNTUNAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAN YANG DIANUT		KELUARGA MEMILIKI BUKU/AKTA NIKAH YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANAK (USIA 0-17 TAHUN) DALAM KELUARGA MEMILIKI AKTA LAHIR YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG			SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI KARTU JAMINAN KESEHATAN (PEMERINTAH/SWASTA)		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT KONFLIK DIANTARA ANGGOTA KELUARGA												
													TANPA TEGUR SAPA (SELAMA 3 HARI BERTURUT-TURUT)			PISAH RANJANG ANTARA SUAMI DAN ISTRI (SELAMA 7 HARI BERTURUT-TURUT)			PERGI DARI RUMAH/MINGGAT (SELAMA 2 HARI BERTURUT-TURUT)			KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA				
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	PANCUNG SOAL	6,240	6,189	51	4,810	109	1,321	3,912	272	2,056	2,638	3,602	80	5,577	583	44	4,873	1,323	58	5,599	583	40	5,617	583	371	5,869
02	RANAH PESISIR	8,548	8,428	120	6,482	127	1,939	4,100	401	4,047	4,136	4,412	132	7,395	1,021	55	6,554	1,939	93	7,434	1,021	34	7,493	1,021	447	8,101
03	LENGAYANG	17,292	17,189	103	12,126	706	4,460	8,962	487	7,843	10,013	7,279	94	15,161	2,037	84	12,747	4,461	81	15,174	2,037	56	15,199	2,037	1,143	16,149
04	BATANG KAPAS	7,735	7,612	123	5,966	333	1,436	4,412	170	3,153	3,374	4,361	77	7,136	522	42	6,257	1,436	61	7,152	522	24	7,189	522	357	7,378
05	IV JURAI	12,833	11,739	1,094	9,738	324	2,771	6,814	169	5,850	8,703	4,130	193	11,391	1,249	130	9,932	2,771	149	11,435	1,249	91	11,493	1,249	678	12,155
06	BAYANG	10,509	10,237	272	6,957	611	2,941	4,958	169	5,382	5,688	4,821	127	8,759	1,623	52	7,516	2,941	80	8,806	1,623	25	8,861	1,623	608	9,901
07	KOTO XI TARUSAN	11,250	10,957	293	8,308	473	2,469	6,138	399	4,713	4,953	6,297	142	10,185	923	62	8,719	2,469	97	10,230	923	43	10,284	923	599	10,651
08	SUTERA	10,539	10,082	457	8,530	786	1,223	6,777	553	3,209	3,584	6,955	121	10,085	333	64	9,252	1,223	91	10,115	333	35	10,171	333	390	10,149
09	LINGGO SARI BAGANTI	13,141	12,462	679	9,549	736	2,856	7,346	1,070	4,725	4,940	8,201	450	11,409	1,282	107	10,178	2,856	105	11,754	1,282	106	11,753	1,282	878	12,263
10	LUNANG	5,767	5,638	129	4,624	207	936	3,247	258	2,262	2,602	3,165	67	5,283	417	31	4,800	936	57	5,293	417	30	5,320	417	236	5,531
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,751	3,692	59	3,019	40	692	2,179	100	1,472	1,631	2,120	67	3,400	284	25	3,034	692	62	3,405	284	22	3,445	284	164	3,587
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,900	1,851	49	1,424	62	414	938	10	952	1,182	718	22	1,698	180	9	1,477	414	15	1,705	180	4	1,716	180	90	1,810
13	AIRPURA	4,095	4,005	90	3,344	88	663	2,562	130	1,403	1,924	2,171	79	3,762	254	45	3,387	663	67	3,774	254	37	3,804	254	225	3,870
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,362	2,988	374	2,962	169	231	2,214	105	1,043	1,296	2,066	67	3,266	29	16	3,115	231	25	3,308	29	18	3,315	29	83	3,279
15	SILAUT	4,005	3,920	85	3,509	32	464	2,523	126	1,356	1,138	2,867	95	3,668	242	28	3,513	464	23	3,740	242	19	3,744	242	121	3,884
JUMLAH TOTAL		120,967	116,989	3,978	91,348	4,803	24,816	67,082	4,419	49,466	57,802	63,165	1,813	108,175	10,979	794	95,354	24,819	1,064	108,924	10,979	584	109,404	10,979	6,390	114,577

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 2

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN														
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" (MAKANAN POKOK, SAYUR/BUAH DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI ASET		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSIA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SD/SEDERAJAT SAMPAI DENGAN SLTA/SEDERAJAT			SELAMA 1 (SATU) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG SAKIT (EMPAT HARI BERTURUT-TURUT) SEHINGGA MENINGGALKAN AKTIFITAS, ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DISABILITAS		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENGAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	PANCUNG SOAL	6,240	5,718	522	6,168	72	2,680	3,560	4,878	1,362	3,097	933	2,210	454	5,786	4,994	1,246
02	RANAH PESISIR	8,548	8,181	367	8,302	246	5,256	3,292	7,086	1,462	3,238	1,847	3,463	1,041	7,507	6,710	1,838
03	LENGAYANG	17,292	15,890	1,402	16,986	306	5,592	11,700	14,001	3,291	7,340	1,131	8,821	1,261	16,031	13,406	3,886
04	BATANG KAPAS	7,735	7,250	485	7,667	68	4,257	3,478	5,550	2,185	3,494	1,536	2,705	801	6,934	6,149	1,586
05	IV JURAI	12,833	11,878	955	12,635	198	7,385	5,448	9,477	3,356	5,250	1,732	5,851	1,554	11,279	9,964	2,869
06	BAYANG	10,509	9,321	1,188	10,234	275	5,703	4,806	6,200	4,309	3,662	2,116	4,731	1,668	8,841	6,584	3,925
07	KOTO XI TARUSAN	11,250	10,440	810	10,892	358	4,725	6,525	6,994	4,256	4,862	1,874	4,514	943	10,307	8,341	2,909
08	SUTERA	10,539	9,881	658	10,209	330	4,900	5,639	7,227	3,312	5,136	2,701	2,702	1,266	9,273	8,050	2,489
09	LINGGO SARI BAGANTI	13,141	12,738	403	12,748	393	6,198	6,943	11,076	2,065	5,906	2,017	5,218	1,348	11,793	10,362	2,779
10	LUNANG	5,767	5,504	263	5,698	69	1,777	3,990	4,631	1,136	2,549	1,184	2,034	996	4,771	4,677	1,090
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,751	3,560	191	3,594	157	2,024	1,727	2,136	1,615	1,627	973	1,151	781	2,970	2,332	1,419
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,900	1,737	163	1,895	5	467	1,433	1,332	568	718	397	785	479	1,421	1,642	258
13	AIRPURA	4,095	3,841	254	4,062	33	2,600	1,495	3,433	662	1,861	1,233	1,001	1,189	2,906	3,228	867
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,362	3,174	188	3,056	306	1,139	2,223	1,699	1,663	1,735	971	656	667	2,695	2,271	1,091
15	SILAUT	4,005	3,982	23	4,003	2	1,750	2,255	3,797	208	1,838	805	1,362	384	3,621	3,570	435
JUMLAH TOTAL		120,967	113,095	7,872	118,149	2,818	56,453	64,514	89,517	31,450	52,313	21,450	47,204	14,832	106,135	92,280	28,687

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 3

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEBAHAGIAAN										
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI WAKTU UNTUK BERINTERAKSI SETIAP HARI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGASUHAN ANAK DILAKUKAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BEREKREASI BERSAMA DI LUAR RUMAH			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA IKUT SERTA DALAM KEGIATAN SOSIAL/GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN RT	
			YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	PANCUNG SOAL	6,240	5,077	580	583	4,288	73	1,879	5,071	586	583	5,873	367
02	RANAH PESISIR	8,548	7,110	417	1,021	5,366	94	3,088	5,880	1,647	1,021	7,252	1,296
03	LENGAYANG	17,292	13,745	1,510	2,037	9,875	811	6,606	11,135	4,120	2,037	13,903	3,389
04	BATANG KAPAS	7,735	6,355	858	522	5,242	250	2,243	5,627	1,586	522	6,213	1,522
05	IV JURAI	12,833	10,942	642	1,249	7,983	371	4,479	9,376	2,208	1,249	9,540	3,293
06	BAYANG	10,509	7,921	965	1,623	5,952	363	4,194	5,946	2,940	1,623	7,316	3,193
07	KOTO XI TARUSAN	11,250	9,437	890	923	7,266	333	3,651	7,348	2,979	923	7,958	3,292
08	SUTERA	10,539	9,809	397	333	7,783	515	2,241	8,373	1,833	333	8,236	2,303
09	LINGGO SARI BAGANTI	13,141	10,632	1,227	1,282	8,488	443	4,210	9,096	2,763	1,282	8,940	4,201
10	LUNANG	5,767	5,113	237	417	4,006	84	1,677	4,344	1,006	417	4,836	931
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,751	3,233	234	284	2,621	41	1,089	2,465	1,002	284	2,829	922
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,900	1,653	67	180	1,152	56	692	1,287	433	180	1,763	137
13	AIRPURA	4,095	3,541	300	254	2,964	41	1,090	3,372	469	254	3,323	772
14	RANAH AMPEK HULU	3,362	2,937	396	29	2,724	54	584	1,976	1,357	29	2,649	713
15	SILAUT	4,005	3,738	25	242	3,030	12	963	3,470	293	242	3,683	322
JUMLAH TOTAL		120,967	101,243	8,745	10,979	78,740	3,541	38,686	84,766	25,222	10,979	94,314	26,653

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran